

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga memberikan acuan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi, Perencanaan Pembangunan Nasional yang diawali dengan Rapat Perencanaan Program Prioritas Tahun 2023 dan Forum Perangkat Daerah Tingkat Provinsi melibatkan Bappeda/PD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 2022
Kepala Dinas,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan	I-4
I.4. Sistematika Penulisan	I-5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD	II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-59
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-62
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kaltim	II-76
II.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-79
II.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	II-79
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-6
III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-9
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023	IV-1
IV.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan.....	IV-2
V. PENUTUP.....	V-1
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
1.	Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	II-8
2.	Daftar Kelompok Tani Penerima bantuan Peremajaan Karet 100 Ha Intensifikasi Karet 100 Ha	II-10
3.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha dan Intensifikasi Kelapa Seluas 20 Ha	II-1
4.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha	II-11
5.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha dan Rehabilitasi Lada seluas 50 Ha	II-12
6.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan kakao seluas 50 Ha dan Intensifikasi kakao seluas 150 Ha	II-14
7.	Data Pengawasan Peredaran Benih tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	II-16
8.	Data Pengawasan Peredaran benih dan Kasus Benih Illegal	II-18
9.	Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	II-20
10.	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapat Bantuan Prasarana Perkebunan	II-20
11.	Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2021	II-22
12.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 100 Ha	II-23
13.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha	II-24
14.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha	II-25

15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha	II-25
16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha	II-26
17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha	II-27
18. Pelaku Usaha yang melakukan Aksi Mitigasi GRK	II-28
19. Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2021	II-34
20. KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2021	II-36
21. Penanganan Konflik Perkebunan Se Kalimantan Timur Tahun 2021	II-38
22. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	II-39
23. Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.	II-40
24. Perusahaan Yang mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)....	II-44
25. Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2021	II-45
26. Lembaga Pekebun yang Dimitrakan Tahun 2021.....	II-48
27. Perusahaan yang dibina	II-49
28. Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021	II-52
29. Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021	II-52
30. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2021	II-54
31. Promosi yang Diikuti Tahun 2021	II-56
32. Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Tahun 2021	II-57
33. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	II-59
34. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2013-2021)	II-60
35. Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2021	II-64
36. Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2021	II-65
37. Tabel T.C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2021.....	II-80
38. Tabel T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	III-12

39. Tabel T.C 31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur IV -3

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan wilayah Kalimantan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA/Perubahan RENSTRA.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan serta berbagai persoalan mendasar seperti pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani, terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurangnya koordinasi kerja antar sub sektor yang terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Program Peningkatan produksi perkebunan;
2. Program Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Program Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
4. Program Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
5. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
9. Program Penyuluhan Pertanian.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”*** dan mengakomodasikan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta

pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2023;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2023;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) Program pembangunan dan 1 (Satu) Program rutin dengan total anggaran sebesar Rp. 54.524.471.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 48.375.766.031,- atau 88,64%. Hal ini dikarenakan sebagian besar terdapat silpa positif yang berasal dari sisa pengadaan barang dan jasa, sisa belanja barang habis pakai, dan sisa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2021 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 23.838.334.677,- dari pagu 26.600.633.592,- dengan capaian keuangan 89,62% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 103%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian 89% dari target 86%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 72,63% atau 103,76% dari target 70%.
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- 3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 23% atau 115% dari target 20%;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 100% atau 500% dari target 20%;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 50% atau 250% dari target 20%; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 20% atau 100% dari target 20%.
- 4) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.
- 5) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;

- b. Pada UPTD PBP tercapai 6 jenis atau 100% dari target 6 jenis;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- 7 Kegiatan diatas di dukung dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yakni :
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen atau 100% dari target 10 dokumen. Dokumen tersebut antara lain: DPA, RKA, DPPA, RKAP, RKT, Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, Pedoman Umum, Evaluasi Renja.

 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun dengan capaian 4 laporan atau 100% dari target 4 laporan. Dokumen tersebut antara lain: LkjIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2020.

 - c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan dengan capaian 28 dokumen atau 100% dari target 28 dokumen dan jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan.

 - d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

 - e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 49 orang atau 98% dari target 50 orang;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 17 orang atau 94% dari target 18 orang;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 6 orang atau 75% dari target 8 orang; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 14 orang atau 93% dari target 15 orang.
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 114 unit atau 100% dari target 114 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 12 unit atau 100% dari target 12 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 75 unit atau 100% dari target 75 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 88 unit atau 100% dari target 88 unit.
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- i) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 47.240 lembar atau 100% dari target 47.240 lembar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 500 lembar atau 100% dari target 500 lembar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 13.100 lembar atau 100% dari target 13.100 lembar; dan

- d. Pada UPTD PBTP tercapai 2.960 lembar atau 100% dari target 2.960 lembar.
- j) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 1.500 eksemplar atau 100% dari target 1.500 eksemplar;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 720 eksemplar atau 100% dari target 720 eksemplar;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 8 eksemplar atau 100% dari target 8 eksemplar; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 12 eksemplar atau 100% dari target 12 eksemplar.
- k) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 4 kegiatan atau 100% dari target 4 kegiatan;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 15 kegiatan atau 100% dari target 15 kegiatan.
- l) **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 34 unit atau 100% dari target 34 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.
- m) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah surat yang diadministrasikan dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 750 lembar atau 100% dari target 750 lembar;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;

- c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.
- n) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- o) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- p) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- q) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit.
- r) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;

- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- s) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 13 unit atau 100% dari target 13 unit.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.377.021.965,- dari pagu Rp. 10.569.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 88,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 5.190.021.450,- dari pagu dana Rp. 6.005.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 86,43% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 101,90%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di dukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2021 18,4 Ton/Ha sedangkan realisasi produktivitas 16,11 Ton/Ha atau capaian kinerja 87,55%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Karet, Kelapa dalam, Kelapa Sawit dan Lada dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849,15	17.461.751,15	101,90	Angka sementara Tahun 2021 (Sumber: Dinas Perkebunan)
	• Kelapa Sawit	17.036.402	17.375.224	101,99	
	• Karet	77.763	70.010	90,03	
	• Kakao	3.771	2.180	57,81	
	• Kelapa Dalam	12.479	10.164	81,45	
	• Lada	6.434	4.173	64,86	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	18,4	16,11	87,55	
	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (dokumen)	1	1	100
	a. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)	0,75	0,52	69,33	
	b. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)	1,4	1,32	94,28	
	c. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)	0,82	0,64	78,04	
	d. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton/Ha)	20	17,30	86,50	
	e. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)	1,18	0,72	61,01	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Peremajaan Karet 100 Ha dan Intensifikasi Karet 100 Ha

Kegiatan peremajaan karet dilaksanakan di Kabupaten Paser dengan capaian 100 Ha dari target 100 Ha. Sedangkan kegiatan intensifikasi karet tercapai

100 Ha dari target seluas 100 Ha berlokasi di Kabupaten Kutai Timur seluas 20 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel 2.2. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet 100 Ha Intensifikasi Karet 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan Karet		
	Gapoktan Jaya Abadi	100	Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali Kab. Paser
II	Intensifikasi Karet		
1.	Sidodai II	20	Desa Margomulyo Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim
2.	Suka Tani II	30	Kpg. Ombau Asa Kec. Barong Kab. Kutai Barat
3.	Riuq Mua Jadiq	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
4.	Tunas Karya	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
Total Bantuan		200	

2) Intensifikasi Kelapa 20 Ha

Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi Kelapa		
	Bina Bersama	20	Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam Kab. PPU
Total Bantuan		40	

3) Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha

Kegiatan Intensifikasi kelapa sawit terealisasi seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kota Samarinda seluas 20 Ha, dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi kelapa sawit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi kelapa sawit		
1	Subur Makmur	50	Desa Tanjung Labu. Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim
2	Pada Elo	20	Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran Kota Samarinda
3	Kutai Mandiri	20	Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
4	Lada Sari	10	Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
Total Bantuan		100	

4) Intensifikasi lada 150 Ha dan rehabilitasi lada 50 Ha

Kegiatan intensifikasi lada terealisasi seluas 150 Ha dari target 150 Ha sedangkan rehabilitasi lada terealisasi seluas 50 Ha dari target 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha, dan Rehabilitasi Lada 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi lada		
1	Garuda Tani	30	Kampung Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau
2	Karya Bersama	25	Kpg. Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau
3	Embun Pagi	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	Hijau Daun	20	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	KTW. Anisa Sejahtera	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
6	Karya Insani	0,75	Kel. Sempaja Utara Berambai Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
7	Karya Utama	1	Kel. Sempaja Utara Berambai Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
8	Karya Utama	1,75	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
9	Karya Abadi	2	Kel. Sempaja Utara

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
10	Tunas Baru	4,5	BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
11	Sejahtera Abadi Jaya	50	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
II	Rehabilitasi Lada		
1	Sri Rejeki A	5	Argomulyo Kab. PPU
2	Sri Rejeki B	14	Argomulyo Kab. PPU
3	Karya Bangun	10	Argomulyo Kab. PPU
4	Karya Muda	5	Argomulyo Kab. PPU
5	Gunung Makmur II	7	Semoi Dua Kab. PPU
6	Tegar	9	Semoi Dua Kec. Sepaku PPU
Total Bantuan		200	

5) Peremajaan Kakao 50 Ha dan Intensifikasi Kakao 150 Ha

Kegiatan Peremajaan kakao terealisasi seluas 50 Ha dan Intensifikasi kakao terealisasi seluas 150 Ha atau terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kabupaten Berau seluas 150 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha dan Intensifikasi Kakao 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan kakao		
	Ingin Bersama	50	Desa rantau Sentosa Kec. Busang Kab. Kutim
II	Intensifikasi kakao		
1	Sejahtera	20	Desa Kadugan Jaya Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2	Lesau Ame	25	Desa Rantau Sentosa Kec.

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
3	Long Ampung	25	Busang Kutai Timur Desa Rantau Sentosa Kec. Busang Kutai Timur
4	Makasang Muara	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
5	Misa Kada	20	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
6	Tunas Harapan	7	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
7	Anugrah Jemalay	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
8	Berkah Tani Sejahtera	17	Kampung PijanauKec. Gunung Tabur Kab. Berau
9	Gapoktan Mufakat	20	Kpg. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau
Total Bantuan		200	

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain faktor cuaca, adanya perubahan pemilihan komoditi oleh petani (alih komoditi) serta umur tanaman yang relatif telah memasuki usia tua sehingga produksi dan produktifitas tanaman tidak maksimal. Disamping faktor teknis yang menghambat pelaksanaan kegiatan, pembatalan reconfusing anggaran juga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 3.323.835.537,- dari pagu sebesar Rp 3.630.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,57% dan untuk capaian indikator kinerja 123,09%. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 75% dengan realisasi 92,32%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output sub kegiatan yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sejumlah 55.000 benih dengan realisasi 100% atau 55.000 benih, yang terdiri dari:

- a. Jumlah benih tanaman semusim dan rempah dengan target 20.000 benih dan realisasi 20.000 benih, terdiri dari benih lada 10.000 benih dan pala 10,000 benih
- b. Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan target 35.000 benih dan realisasi 30.000 benih, terdiri dari kakao 10.000 benih, kelapa 10.000 benih dan kelapa sawit 15.000 benih

Faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yaitu faktor cuaca dan ketersediaan prasarana dan sarana perbenihan yang masih kurang. Untuk itu perlu adanya upaya sebagai langkah antisipasi terhadap kendala yang dihadapi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perbenihan seperti jalan, greenhouse, serta perlunya pengembangan kebun induk lada dan sarana pendukungnya.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 863.164.978,- atau 92,42% dari pagu Rp. 934.000.000,-. Indikator kinerja pada pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2021:

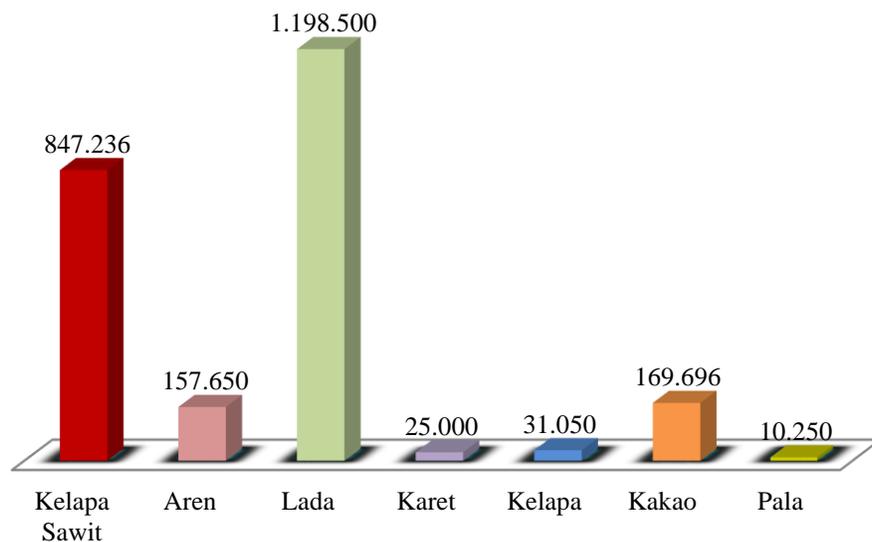
Tabel 2.7. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Bulan	Kelapa Sawit	Lada	Karet	Aren	Kelapa	Kakao	Pala	Serai Wangi	Jumlah	Benih Illegal	Jumlah Total
1.	Januari	11,276	1,075,000	37,000	28,000	3,000	7,500	10,000		1,171,776	32,500	
2.	Pebruari	126,991				18,000	50,000			194,991		
3.	Maret	2,454			150					2,604		
4.	April	136,293	116,500		51,000					303,793		
5.	Mei	21,308	182,700	100,000			45,000		4,000	353,008		
6.	Juni	49,475			6,000					55,475		
7.	Juli	111,179	212,500				157,500			481,179		
8.	Agustus	564,420	83,000		12,000		10,000	10,000		679,420		
9.	September	274,170				10,000				284,170		
10.	Oktober	371,684								371,684		
11.	November	245,000								245,000	20,000	
12.	Desember	1,926,000								1,926,000		
Jumlah		3,840,250	1,669,700	137,000	97,150	31,000	270,000	20,000	4,000	6,069,100	52,500	6,121,600

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Sedangkan sub kegiatan pada kegiatan ini adalah: pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman, dengan indikator:

a. Jumlah benih yang disertifikasi

Capaian indikator ini adalah 2.343.046 benih atau 78,10% dari target 3.000.000 benih, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2.1. Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah terbatasnya jumlah Pengawas Benih Tanaman (PBT) yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang meliputi 1 (satu) Pengawas benih Tanaman Ahli dan 3 (tiga) Pengawas Benih Tanaman Terampil membawahi 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 Provinsi Kalimantan Utara sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan maksimal serta tidak tercapainya jumlah benih yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kegiatan ini tergantung pada jumlah permohonan masuk.

b. Persentase peredaran benih yang illegitim

Capaian indikator ini adalah 2,51% atau 102,71% dari target 2,58%. Capaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh tenaga pengawas benih yang ada di Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas)

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penanganan peredaran benih ilegal kelapa sawit. Adapun data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Ilegal

No	Asal/Lokasi	Jenis Komoditi	Jumlah Benih	
			Pengawasan	Kasus benih ilegal
1	Desa Girimukti Kab. PPU	Kelapa Sawit	2.500 benih	2.500 benih
2	Desa Putang Kab. Paser	Kelapa Sawit	30.000 batang	30.000 batang
3	Desa Tepian Langsung	Kelapa Sawit	20.000 benih	20.000 benih
4	Kelompok Tani Etam Mandiri Jaya Kec. Muara Jawa	Kelapa Sawit	910 benih	-
5	Kec. Muara Jawa	Kopi	12.000 benih	-
6	Kec. Muara Jawa	Kelapa Dalam	19.325 benih	-
7	CV. Eja Nursery Kab. Kutai Kartanegara	Entres Karet	5.870 pohon	-
8	Kelompok Tani Mega Buana Kab. Kukar	Lada	457.000 stek	-
9	Kelompok Tani Tunas Mekar Kab. Kukar	Lada	65.000 stek	-
10	Kelompok Tani Lada Muda Kab. Kukar	Lada	451.000 stek	-
11	Kab. Bulungan	Lada	221.000 stek	-
12	UPTD PBTP Disbun Kaltim	Kelapa Sawit	25.000 benih	-
		Karet	25.000 benih	-
		Aren	10.000 benih	-

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih bibit perkebunan pada tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada sumber benih maupun produsen benih tanaman perkebunan.
- b. Terbatasnya petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang hanya berjumlah sebanyak 4 (empat) orang sedangkan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Kurang aktifnya petugas pengawas benih di Kabupaten/Kota dalam mengawasi sumber benih/produsen benih yang ada di wilayahnya sehingga pengawasan

peredaran benih di masing-masing Kabupaten/ Kota tidak maksimal dan ketersediaan benih perkebunan tidak dapat dipantau.

- d. Produsen benih yang telah mempunyai IUPBTP tidak pernah secara rutin melaporkan kegiatan perbenihannya setiap bulan kepada pengawas benih Kabupaten/Kota maupun UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Banyak produsen benih yang tidak menyimpan dokumen penyerta benih dengan baik.
- f. Produsen benih tidak pernah melaporkan pemasangan label benih (pada saat benih diedarkan) kepada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Tidak ada koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan dari luar wilayah yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur kepada Pengawas Benih Tanaman Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.638.333.304,- dari pagu Rp. 10.337.196.000,- (83,37%) dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- 1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 6.679.289.750,- dari pagu Rp 7.995.000.000,- atau 83,54%. Output program ini adalah:

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.517.300 Ha dari target 1.425.580 Ha atau 106,43%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.9. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1.	Kelapa Sawit	1.359.016
2.	Karet	118.626
3.	Kakao	7.617

No.	Komoditi	Luas (Ha)
4.	Kelapa Sawit	20.018
5.	Lada	8.128
6.	Komoditi Lain	3.895
Total		1.517.300

*) Angka sementara tahun 2021

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 34 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 113,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
Perluasan Kelapa Sawit		
1.	Barokah	PPU
2.	Bukit Babut	PPU
3.	Alas Panyom Bolum	PPU
4.	Maju Makmur	Kukar
5.	Mekar Sari	Kukar
6.	Maju Terus	Kubar
7.	Bina Warga	Kubar
8.	Utok Ipuh	Paser
Perluasan Kelapa		
9.	Sumber Rejeki	Paser
Perluasan Lada		
10.	Balu Mulya	Paser
11.	Usaha Baru	Paser

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
12.	Harapan Sejahtera	Kukar
13.	KTW. Anisa Sejahtera	Kukar
14.	Harapan Utama	PPU
15.	Karya Usaha	PPU
16.	Al-Ikhlas	PPU
17.	Trubus	PPU
18.	Lestari A	PPU
19.	Sinar Mulya	Kutim
20.	Karya Tani	Kukar
	Perluasan Kakao	
21.	Lembah Subur	Berau
22.	Bukit Harapan	Berau
23.	Mantaruning Jaya	Berau
24.	Sukan Lestari	Berau
25.	Apollo	Berau
	Perluasan Karet	
26.	Tujur Betung	Paser
27.	Anugrah	PPU
28.	Guyub Rukun	Kukar
29.	Karya Tani	Kukar
30.	Mekar Baru	Kukar
31.	Mekar Jaya	Kukar
32.	Karya Bersama	Kukar

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
33.	Sambung Jaya Makmur	Kukar
	Perluasan Pala	
34.	Mitra tani	Berau

Program ini di dukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 670 Ha atau 100% dari target 670 Ha. Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya yaitu jumlah luas kebun yang diperluas dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.11. Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2021

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	670	670	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200	200	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20	20	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	200	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50	50	100

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan perluasan kebun 6 komoditi di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Perluasan areal kakao seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan

dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 100 Ha dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Perluasan kakao		
1	Lembah Subur	30	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
2	Bukit Harapan	20	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
3	Mantaruning Jaya	20	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
4	Sukan Lestari	25	Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
5	Apollo	5	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
Total Bantuan		100	

2) Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal karet tercapai 200 Ha dari target 200 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 45 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 20 Ha, dan Kabupaten Kutai Kertanegara 135 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Perluasan Karet		
1	Tujur Betung	45	Desa Mungguh Kec. Longkali Kab. Paser
2	Anugrah	20	Kelurahan Gersik Kec. Penajam Kab. PPU

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
3	Guyub Rukun	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
4	Karya Tani	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
5	Mekar Baru	20	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kukar
6	Mekar Jaya	10	Desa Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kukar
7	Karya Bersama	15	Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kukar
8	Sambung Jaya Makmur	40	Prangat Baru Kab. Kukar
Total Bantuan		200	

3) Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 20 Ha dari target 20 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 20 Ha dan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 2.14. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Perluasan Areal Kelapa		
	Sumber Rejeki	20	Desa Laburan Baru Kec. Paser Belengkong Kab. Paser
	Total bantuan	20	

4) Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 200 Ha dari target 200 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 80 Ha, Kabupaten Paser 40 Ha dan Kutai Kertanegara seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
	Perluasan kelapa sawit		
1	Barokah	24	Desa Api-api Kec. Waru Kab. PPU
2	Bukit Babut	26	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
3	Alas Panyom Bolum	30	Desa Labangka Kab. PPU
4	Maju Makmur	15	Sari Nadi Kota Bangun Kab. Kukar
5	Mekar Sari	10	Teluk Muda Kec. Kenohan Kab. Kukar
6	Maju Terus	30	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
7	Bina Warga	25	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar
8	Utok Ipuh	40	Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang Kab. Paser
Total Bantuan		200	

5) Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 40 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 22 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 28 Ha, dan Kabupaten Kutai Timur seluas 10 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
Perluasan lada			
1	Balu Mulya	30	Desa BelimbingKec. Long Ikis Kab. Paser
2	Usaha Baru	10	Desa Selerong Kec. Muara Komam Kab. Paser
3	Harapan Sejahtera	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	KTW. Anisa Sejahtera	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	Harapan Utama	4	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
6	Karya Usaha	7	Desa Rintik Kec. Babulu Kab. PPU
7	Al-Ikhlas	6	Desa Bukit Subur Kec. Penajam Kab. PPU
8	Trubus	5	Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU
9	Lestari A	6	Desa Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutim Perangat Selatan Kab. Kukar
10	Sinar Mulya	10	

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
11	Karya Tani	7	
Total Bantuan		100	

6) Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

Kegiatan perluasan areal pala tercapai 50 Ha dari target 50 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 50 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 2.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
	Perluasan Pala		
1	Mitra Tani	50	Desa Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau
Total Bantuan		50	

Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa faktor penghambat walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi capaian target kinerja, namun perlu dilakukan antisipasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. Faktor penghambat dimaksud antara lain adalah faktor cuaca, keterlambatan pembukaan lahan oleh kelompok tani dan keterlambatan ketersediaan benih di Kalimantan Timur. Upaya sosialisasi kepada kelompok tani maupun penangkar perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari faktor penghambat tersebut.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 1.959.043.554,- atau 83,64% dari pagu sebesar Rp. 2.342.196.000, . Indikator pada program ini adalah jumlah prasarana kantor yang tersedia dengan target 2 unit dan realisasi sebanyak 2 unit atau 100%. Kegiatan pada program ini adalah penataan prasarana pertanian dengan indikator jumlah prasarana pertanian. Indikator kegiatan ini tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit. Sedangkan sub pada kegiatan ini adalah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya. Indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah

bangunan gedung dan laboratorium yang direhab dengan capaian 2 unit atau 100% dari target 2 unit.

d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.211.933.926,- dari pagu Rp. 2.438.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 90,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 1132.376.875,- atau 92,89% dari pagu dana Rp 1.219.000.000,-. Output program ini adalah Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 6,73 Juta Ton CO₂eq atau 164,99% dari target 4,079 Juta Ton CO₂eq . Program ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan output kegiatan :

a. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 100 % atau dengan capaian 128 pelaku usaha dari 128 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
1.	PT. London Sumatera Plantation	Kutai Barat
2.	PT. Citra Palma Pertiwi	Mahulu
3.	PT. Setia Agro Abadi	Mahulu
4.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	PPU
5.	PT. Kebun Mandiri Sejahtera	PPU
6.	PT. Sukses Tani Nusasubur	PPU
7.	PT. Waru Kaltim Plantation	PPU
8.	PT. Langgeng Muara Makmur	Paser
9.	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Paser
10.	PT. Multi Jayantara Abadi	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
11.	PT. Nusa Lestari	Paser
12.	PT. Pucuk Jaya	Paser
13.	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Paser
14.	PT. Aneka Raksa International	Kutai Barat
15.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kutai Barat
16.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kutai Barat
17.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Kutai Barat
18.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kutai Barat
19.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Kutai Barat
20.	PT. Ketapang Hijau Lestari	Kutai Barat
21.	PT. Marsam Citra Adiperkasa	Kutai Barat
22.	PT. Agroindo Sukses Sejahtera	Berau
23.	PT. Berau Agro Kusuma	Berau
24.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Berau
25.	PT. Gunta Samba Jaya	Berau
26.	PT. Hutan Hijau Mas	Berau
27.	PT. Jabontara Eka Karsa	Berau
28.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Berau
29.	PT. Malindomas Perkebunan	Berau
30.	PT. Mulia Inti Perkasa	Berau
31.	PT. Satu Sembilan Delapan	Berau
32.	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Berau
33.	PT. General Aura Semari	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
34.	PT. Tunas Alam Nusantara	Berau
35.	PT. Yudha Wahana Abadi	Berau
36.	PT. Agri Eastborneo Kencana	Berau
37.	PT. Agro Bumi Kaltim	Berau
38.	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Berau
39.	PT. Alam Jaya Perkasa	Berau
40.	PT. Bahtera Bahagia	Berau
41.	PT. Budiduta Agro Makmur	Berau
42.	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Berau
43.	PT. Enggang Alam Sawita	Berau
44.	PT. Hamparan Sentosa	Berau
45.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Berau
46.	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Berau
47.	PT. Kutai Agro Jaya	Berau
48.	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Berau
49.	PT. Manunggal Adi Jaya	Berau
50.	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Berau
51.	PT. Niagamas Gemilang	Berau
52.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Berau
53.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Berau
54.	PT. Rea Kaltim Plantations	Berau
55.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Berau
56.	PT. Sawit Golden Prima	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
57.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Berau
58.	PT. Sawit Prima Sakti	Berau
59.	PT. Sukses Bina Alam	Berau
60.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Berau
61.	PT. Teguhjaya Prima Abadi	Berau
62.	PT. Tritunggal Sentra Buana	Berau
63.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Berau
64.	PT. Anugerah Alam Persada	Kutai Timur
65.	PT. Anugerah Energitama	Kutai Timur
66.	PT. Agro Inti Mandiri	Kutai Timur
67.	PT. Bima Agri Sawit	Kutai Timur
68.	PT. Bina Palma Nugraha	Kutai Timur
69.	PT. Bumi Mas Agro	Kutai Timur
70.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kutai Timur
71.	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur
72.	PT. Cipta Prima Selaras	Kutai Timur
73.	PT. Dewata Intisawit Nugraha	Kutai Timur
74.	PT. Dewata Sawit Nugraha	Kutai Timur
75.	PT. Dharma Agrotama Nusantara	Kutai Timur
76.	PT. Dinamika Prima Artha	Kutai Timur
77.	PT. Etam Bersama Lestari	Kutai Timur
78.	PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera	Kutai Timur
79.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
80.	PT. Gemilang Sejahtera Abadi	Kutai Timur
81.	PT. Gunta Samba	Kutai Timur
82.	PT. Gunta Samba Jaya	Kutai Timur
83.	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Kutai Timur
84.	PT. Hanusentra Agro Lestari	Kutai Timur
85.	PT. Indonesia Plantation Sinergi	Kutai Timur
86.	PT. Karya Prima Agro Sejahtera	Kutai Timur
87.	PT. Karyanusa Ekadaya	Kutai Timur
89.	PT. Kemilau Indah Nusantara	Kutai Timur
90.	PT. Kutai Balian Nauli	Kutai Timur
91.	PT. Kutai Mitra Sejahtera	Kutai Timur
92.	PT. Long Bagun Prima Sawit	Kutai Timur
93.	PT. Multi Pacific International	Kutai Timur
94.	PT. Nala Palma Cadudasa	Kutai Timur
95.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation	Kutai Timur
96.	PT. Perdana Telen Agromas	Kutai Timur
97.	PT. Prima Cipta Selaras	Kutai Timur
98.	PT. Sawit Sukses Sejahtera	Kutai Timur
99.	PT. Setara Kemilau Mas Adicita	Kutai Timur
100.	PT. Sinergi Agro Industri	Kutai Timur
101.	PT. Sumber Bumi Serasi	Kutai Timur
102.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	Kutai Timur
103.	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
104.	PT. Subur Abadi Wana Agung	Kutai Timur
105.	PT. Sumber Alam Selaras	Kutai Timur
106.	PT. Sumber Kharisma Persada	Kutai Timur
107.	PT. Telen	Kutai Timur
108.	PT. Telen Prima Sawit	Kutai Timur
109.	KTPA Desa Salo Palai	Kutai Kartanegara
110.	KTPA Saliki Dock	Kutai Kartanegara
111.	KTPA Saliki Nilam	Kutai Kartanegara
112.	KTPA Genting Tanah	Kutai Kartanegara
113.	KTPA Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
114.	KTPA Muai	Kutai Kartanegara
115.	KTPA Gotong Royong	Kutai Kartanegara
116.	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Samarinda
117.	KTPA Waru	PPU
118.	KTPA Bangun Mulyo	PPU
119.	KTPA Labangka	PPU
120.	KTPA Labangka Barat	PPU
121.	KTPA Desa Tepian Terap	Kutai Timur
122.	KTPA Desa Pelawan	Kutai Timur
123.	KTPA Desa Sange Batu	Paser
124.	KTPA Desa Perepat	Paser
125.	KTPA Desa Sungai Langir	Paser
126.	KTPA Desa Lori	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
127.	KTPA Desa Laburan	Paser
128.	KTPA Tunas Harapan	Balikpapan

b. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan dengan realisasi 7 pelaku usaha atau 140% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target.

Perlaku usaha tersebut antara lain:

1. PT. AE di Kabupaten Kutai Timur;
2. PT. TPS di Kabupaten Kutai Timur;
3. PT. SAWA di Kabupaten Kutai Timur;
4. PT. GSA di Kabupaten Kutai Timur;
5. PT. Jaya Mandiri Sukses di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. PT. Rea Kaltim Plantation di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
7. PT. WKP di Kabupaten Penajam Paser Utara.

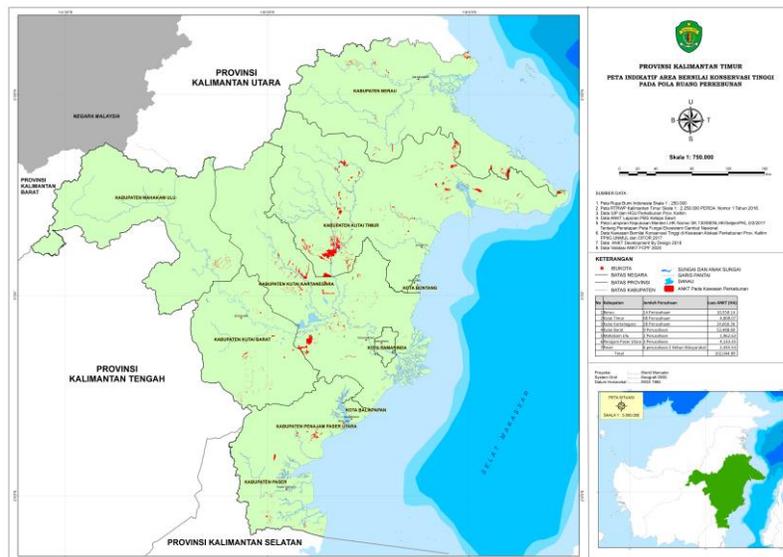
Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp 632.000.000,- terealisasi sebesar Rp 580.748.200,- (91,89%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
 - a) Jumlah perusahaan yang mengembangkan *bioenergy* 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. London Sumatera Plantation di Kabupaten Kutai Barat. Dalam mendukung penanganan dampak perubahan iklim Dinas Perkebunan terus berupaya mendorong Perusahaan Besar Swasta untuk membangun perkebunan dengan melakukan penurunan emisi melalui sosialisasi dan koordinasi ke Perusahaan Besar Swasta yang ada.
 - b) Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi dengan capaian 102.038,85 ha atau 100,04% dari target 102.000 Ha. Data luas NKT di areal perkebunan yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel 2.19. Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Berau	10.534,39

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
2.	Kutai Barat	4.805,38
3.	Kutai Kartanegara	24.648,18
4.	Kutai Timur	53.355,71
5.	Mahulu	1.962,28
6.	Paser	4.213,31
7.	PPU	2.519,60
	Total	102.038,85



Gambar 2.2. Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

2. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 587.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 551.628.675,- (93,97%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
 1. Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina terealisasi sebanyak 20 KTPA atau 133,33% dari target 15 KTPA. Keberhasilan pembentukan Kelompok Tani Peduli API (KTPA) dipengaruhi oleh adanya

sosialisasi ke kabupaten/kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.20. KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2021

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
1	KTPA Desa Salo Palai	Desa Salo Palai	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
2	KTPA Saliki Dock	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
3	KTPA Saliki Nilam	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
4	KTPA Genting Tanah	Desa Genting Tanah	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
5	KTPA Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
6	KTPA Muai	Desa Muai	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
7	KTPA Gotong Royong	Desa Perdana	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
8	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Kelurahan Pampang	Kec. Samarinda Utara	Samarinda
9	KTPA Waru	Kel. Waru	Kec. Waru	Penajam Paser Utara

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
10	KTPA Bangun Mulyo	Kel. Bangun Mulyo	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
11	KTPA Labangka	Kel. Labangka	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
12	KTPA Labangka Barat	Kel. Labangka Barat	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
13	KTPA Desa Tepian Terap	Desa Tepian Terap	Kec. Sangkulirang	Kutai Timur
14	KTPA Desa Pelawan	Desa Pelawan	Kec. Sangkulirang	Kutai Timur
15	KTPA Desa Sange Batu	Desa Sange Batu	Kec.Paser Balengkong	Paser
16	KTPA Desa Perepat	Perepat	Kec. Tanah Grogot	Paser
17	KTPA Desa Sungai Langir	Desa Sungai Langir	Kec. Tanah Grogot	Paser
18	KTPA Desa Lori	Desa Lori	Kec. Tanjung Harapan	Paser
19	KTPA Desa Laburan	Desa Laburan	Kec.Paser Balengkong	Paser
20	KTPA Tunas Harapan	Kelurahan Karang Joang	Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan

2. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 7 konflik atau 140% dari target 5 konflik. Keberhasilan penanganan konflik dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dalam memfasilitasi kegiatan mediasi konflik (honor & fasilitasi pertemuan mediasi). Di samping itu terdapat pula faktor penghambat kegiatan penanganan konflik

yaitu jika salah satu pihak tidak ingin dilakukan mediasi sehingga konflik tidak dapat tertangani dengan baik. Pelaksanaan penanganan konflik tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 2.21. Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
1	Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. AE vs Kelompok Tani Citra Mega Buana dan Kelompok Tani Kudung Permai 2. PT. TPS vs Masyarakat Desa Menamang 3. PT. Subur Abadi Wana Agung, PT. Hamparan Perkasa Mandir vs Masyarakat Adat dayat Desa Long Bentuq 4. PT. Gemilang Sejahtera Abadi vs Masyarakat Desa Tanah Abang 	<p>Mediasi tgl. 7 April 2021 di Dinas PPR Kutim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi 1 Juli 2021 di Hotel Grand Fatma TGR (Mediasi I) 2. Mediasi 13 Juli 2021 di Disbun Prov Kaltim dan Zoom 3. Mediasi tgl 12 Oktober 2021 di kantor Disbun Ka. Kukar 4. Mediasi tanggal 17 November 2021 di Hotel Harris <p>Mediasi 5 November 2021 di Kantor Gubernur Kaltim, Mediasi DPD RI</p> <p>Mediasi 11 November 2021 di Disbun Kutim</p>
2	Kutai Kertanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Jaya Mandiri Sukses vs PT. Surya Cipta Mahakam 2. PT. Rea Kaltim vs 3 Kecamatan Janggut, 	<p>Mediasi 18 Maret 2021 di Disbun Prov. Kaltim</p> <p>Mediasi 19 Agustus 2021 di Bappeda Kukar</p>

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
		Kec. Tabang dan Kec. Kenohan	
3	Penajam Pasir Utara	PT. Waru Kaltim Plantations vs Koperasi Waru Sawit Nusantara	Mesiasi 17 Maret 2021 di Distan PPU

2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.079.557.051,- atau 88,56% dari pagu sebesar Rp 1.219.000.000,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 1.044.792.912,- atau 99,78% dari target Rp. 1.047.138.860,-. Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 220 Ha atau 100% dari target 220 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.22. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
1	Balikpapan	14 Ha
2	Samarinda	0 Ha
3	Bontang	0 Ha
4	Kutai Kartanegara	0 Ha
5	Kutai Barat	0 Ha
6	Kutai Timur	1 Ha
7	Mahulu	52 Ha
8	Paser	3 Ha

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
9	Penajam Paser Utara	11 Ha
10	Berau	139 Ha
	Total	220 Ha

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator antara lain:

- Jenis APH yang dikembangkan dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis (100%). Jenis APH yang dikembangkan tersebut yaitu *Beauveria Bassiana* dan *Metarhizium anisopliae*.
- Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter) dengan target 600 liter dan realisasi 600 liter (100%).
- Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga) dengan target 2 lembaga dan realiasi 2 lembaga (100%). Lembaga tersebut yaitu Regu Pengendali OPT (RPO) dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT).
- Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha) dengan target 220 Ha dan realisasi 220 Ha (100%). Pelaksanaan pengendalian serangan OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.23. Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
1	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	156.83	135.00
2	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (Conopomorpha cramerella)	89.83	52.00
3	Kelapa	Busuk pangkal batang	7.30	7.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
	Sawit	(Ganoderma boninense)		
7	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	142.50	4.00
8	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius (Marasmius palmivorus)	0.25	3.00
10	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioidies sp.)	30.50	3.00
11	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	50.00	3.00
9	Karet	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	0.50	2.00
14	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	21.90	2.00
16	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxyporum, dan Pratylenchus sp.)	1.50	2.00
18	Kelapa Sawit	Apogonia sp.	5.00	1.00
19	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	5.00	1.00
20	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	0.63	1.00
21	Lada	Ganggang Pirang	1.00	1.00
22	Kelapa	Kumbang janur (Brontispa sp.)	4.00	1.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
23	Kelapa	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	1.50	1.00
17	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (<i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxyporum</i> , dan <i>Pratylenchus</i> sp.)	1.50	1.00
26	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	1.00	0.00
27	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	2.00	0.00
28	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	5.00	0.00
5	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	2.50	0.00
29	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	8.70	0.00
30	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	5.00	0.00
31	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	5.00	0.00
6	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	7.50	0.00
32	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	15.00	0.00
33	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	5.00	0.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
34	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	5.00	0.00
12	Lada	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	0.50	0.00
13	Karet	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	3.00	0.00
35	Kelapa Sawit	karat daun	0.25	0.00
4	Kelapa	Kera	5.00	0.00
36	Karet	Kering Alur Sadap	150.00	0.00
24	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	10.00	0.00
37	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	0.40	0.00
38	Kelapa Sawit	Landak (Hystrix braciura)	4.00	0.00
15	Lada	Penghisap buah lada (Dasynus piperis)	19.00	0.00
39	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxyporum, dan Pratylenchus sp.)	2.56	0.00
25	Kelapa Sawit	Tikus (Rattus rattus)	5.00	0.00
40	Kelapa Sawit	Tikus (Rattus rattus)	3.00	0.00
41	Kelapa	Ulat api (Setora sp./Parasa sp./Darna)	10.00	0.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
	Sawit	catenatus/Thosea sp./Hidari irava)		
42	Kelapa Sawit	Ulat kantong (Mahasena corbetti atau Metisa plana)	70.25	0.00
Total			864.40	220.00

Keberhasilan capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh telah dibentuknya kelembagaan brigade proteksi dan regu pengendali OPT, terkendalinya luas pengendalian OPT, bantuan dari pusat dalam bentuk pestisida nabati 900 liter, serta diselenggarakannya pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pelatihan perbanyakkan APH.

- e. **Program Perizinan Usaha Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 772.764.300,- atau 98,57% dari pagu sebesar Rp. 784.000.000,-. Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 41 perusahaan atau 117,14%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2021 sebagai berikut::

Tabel 2.24. Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Perusahaan
1	Kutai Timur	1. PT. Sinergi Agro Industri 2. PT. Sinergi Agro Industri (mill) 3. PT. Indonesia Plantation Sinergy 4. PT. Bima Palma Nugraha 5. PT. Bina Agri Sawit 6. PT. tapian Nadenggan 7. PT. Kresna Duta Agroindo 8. PT. Kalimantan Agro Nusantara 9. PT. Telen (Bukit Permata/Mill) 10. PT. Telen (Sei Karang Estate) 11. PT. Telen (Pengadan Estate) 12. PT. Telen Prima Sawit
2	Kutai Kertanegara	1. PT. Sawit Kaltim Lestari 2. PT. Agri East Borneo Kencana 3. PT. Agrojaya Tirta Kencana

No	Kabupaten	Perusahaan
		4. PT. Maju Kalimantan Hadapan 5. PT. Sawit Prima Sakti 6. PT. Cahaya Anugerah Plantition 7. PT. Prima Mitrajaya mandiri 8. PT. teguh Jayaprima Abadi 9. PT. Jaya Mandiri Sukses 10. PT. Hamparan Sentosa
3	Kutai Barat	1. PT. Kaltim Hijau Makmur 2. PT. Borneo Citra Persada Jaya 3. PT. Bumi Agro Lestari 4. PT. Kruing Lestari Jaya
4	Penajam Paser Utara	1. PT. Sukses Tani Nusasubur 2. PT. Waru Kaltim Plantation 3. PT. Kebun Mandiri Sejahtera 4. PT. Mega Hijau Bersama 5. PT. Alam Permai Makmur Raya 6. PT. Agro Indomas 7. PT. Megah Hijau Lestari 8. PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 9. PT. Triteknik Kalimantan Abadi 10. PT. Dwi Mekar Persada 11. PT. Palma Asia Lestari Mandiri 12. PT. Sagita Agro Kencana
5	Berau	1. PT. Global Primatama Mandiri 2. PT. Satu Sembilan Delapan 3. PT. Jabontara Eka Karsa
Total		41 Perusahaan

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 89 perusahaan atau 102,30% dari target 87 perusahaan, yang terdiri dari 64 pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tahun 2021 dan 25 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2020. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 2.25. Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara KIIlau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan 12. PT. KBSA 13. PT. Sabantara Rawi Sentosa 14. PT. KIN 15. PT. IPS 16. PT. Nala Palma Cadudasa 17. PT. SAP 18. PT. KCW 19. PT. TAL 20. PT. Nadila Indoagro Planttaion 21. PT. Alhada Agro Sejahtera 22. PT. Mukti Sejahtera Abadi 23. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 24. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Inti Sawit Nugraha 25. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa 26. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 27. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa 28. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi 29. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo 30. KSU Karya Mulia Etam Mitra Usaha PT Telen 31. Koperasi Bumi Baay Persada Mitra Usaha PT Telen 32. KSU Nyawatan Sawit Lestari (Sei Karang Estate) Mitra Usaha PT Telen 33. Kop Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 34. Koperasi Berkat Telen Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 35. Koperasi Rukmana Sari Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 36. KSU Bina Abadi Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 37. Koperasi Sumber Harum Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 38. KSU Etam Jaya Mandiri I Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		39. Koperasi Titian Bungur Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 40. KSU Rakyat Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 41. KSU Pasir Putih Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 42. KSU Karya Maju Bersama (KMB) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 43. Koperasi Pemuda Sasangka (Fairco II) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 44. Koperasi Lestari Jaya Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 45. Koperasi Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 46. KSU Benua Baru Mitra Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
2.	Kutai Kartanegara	47. PT. Niagamas gemilang 48. PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 49. PT. Hamparan Sentosa 50. PT. Mitra Bangsa Utama 51. KPRI Aroma 52. PT. PMM 53. PT. TJA 54. PT. Rea Kaltim Plantations 55. PT. JMS 56. PT. Enggang Alam Sawita 57. Kop. Menamang Membangun 58. Kop. Mou Sejahtera 59. PT. Sukses Bina Alam
3.	Kutai Barat	60. PT. Rimba Raya Tama 61. PT. Harapan Rimba Raya 62. PT. KAL 63. PT. CAK 64. PT. Kruing 65. PT. Farinda Bersaudara 66. PT. BCPM 67. PT. BJPJ 68. Koperasi Sawit Mahang Permai Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 69. Koperasi Tuah Haji Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 70. Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Mitra Usaha PT. Farinda Bersaudara 71. Koperasi Sempek Penawang Lendian Sejahtera Mitra Usaha PT Ketapang Agro Lestari 72. Koperasi Sawit Karya Bersama Lestari Jaya Mitra Usaha PT Kruing Lestari Jaya 73. Koperasi Sawit Sibak Mandiri Mitra Usaha PT Kutai

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		Agro Lestari (CT Agro)
4.	Penajam Paser Utara	74. PT. WKP 75. PT. SBSL 76. PT. Mega Hijau Bersama 77. PT. Mega Hijau Lestari 78. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 79. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 80. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations
5.	Berau	81. PT. Cahaya Agro Sejahtera 82. PT. Tunas Alam Nusantara
6.	Paser	83. PT. BWS 84. PT. GMK 85. PT. AAMU 86. PT. M3A 87. PT. BMML 88. Koperasi Lengkuan Jaya Mitra Usaha PT. Pucuk Jaya 89. Koperasi Marinjan Himba Makmur Bolom Mitra Usaha PT Pucuk Jaya

Sub Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator :

1. Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan dengan target sebanyak 35 lembaga pekebun terealisasi sebanyak 35 lembaga pekebun (100%). Terdapat penambahan 10 lembaga pekebun yang dimitrakan dari tahun 2020. Lembaga pekebun yang dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 2.26. Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
1.	Kutai Timur	1. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 2. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Intisawit Nugraha 3. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa 4. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 5. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa 6. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
		7. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo
2.	Penajam Paser Utara	1. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 2. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 3. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina dengan target 52 perusahaan dan realisasi 54 perusahaan (103,85%). Perusahaan yang dibina tersebut antara lain:

Tabel 2.27. Perusahaan yang Dibina Tahun 2021

No.	Kabupaten	Perusahaan
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera 4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara KIllau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan 12. PT. KBSA 13. PT. Sabantara Rawi Sentosa 14. PT. KIN 15. PT. IPS 16. PT. Nala Palma Cadudasa 17. PT. SAP 18. PT. KCW 19. PT. TAL 20. PT. Nadila Indoagro Planttaion 21. PT. Alhada Agro Sejahtera 22. PT. Mukti Sejahtera Abadi
2.	Kutai Kartanegara	23. PT. Niagamas gemilang 24. PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 25. PT. Hampan Sentosa 26. PT. Mitra Bangga Utama

No.	Kabupaten	Perusahaan
		27. KPRI Aroma 28. PT. PMM 29. PT. TJA 30. PT. Rea Kaltim Plantations 31. PT. JMS 32. PT. Enggang Alam Sawita 33. Kop. Menamang Membangun 34. Kop. Mou Sejahtera 35. PT. Sukses Bina Alam
3.	Kutai Barat	36. PT. Rimba Raya Tama 37. PT. Harapan Rimba Raya 38. PT. KAL 39. PT. CAK 40. PT. Kruing 41. PT. Farinda Bersaudara 42. PT. BCPM 43. PT. BJPJ
4.	Penajam Paser Utara	44. PT. WKP 45. PT. SBSL 46. PT. Mega Hijau Bersama 47. PT. Mega Hijau Lestari
5.	Berau	48. PT. Cahaya Agro Sejahtera 49. PT. Tunas Alam Nusantara
6.	Paser	50. PT. BWS 51. PT. GMK 52. PT. AAMU 53. PT. M3A 54. PT. BMML

Capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan di atas dapat melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Melakukan modifikasi dan inovasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam situasi COVID 19 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan;
3. Melakukan pertemuan fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan tentang peraturan dan perundang undangan tentang kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;

4. Melakukan koordinasi dengan semua pihak baik di Provinsi Kaltim, Kabupaten/Kota se Kaltim dan Mitra Pembangunan Perkebunan dalam percepatan penyelesaian konflik perkebunan melalui mediasi; dan
5. Melakukan koordinasi kepada Mitra Pembangunan Perkebunan (YKAN dan Wisolve) dalam pelaksanaan Pelatihan SIP Kebun Lanjutan.

Meskipun pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas melampaui target namun masih ditemui permasalahan diantaranya:

1. Pada tahun 2021 masih tingginya kasus COVID 19 sehingga semua pelaksanaan kegiatan terhambat;
 2. Kurangnya Tenaga Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang bersertifikat;
 3. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten;
 4. Belum pahamnya masyarakat pekebun tentang arti kemitraan;
 5. Masih adanya perusahaan perkebunan yang belum menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya;
 6. Kurangnya tenaga ahli penilai fisik kebun;
 7. Aplikasi SIP Kebun pada Web Site Disbun yang belum siap dan mengalami gangguan dan perbedaan formn isian dengan kabupaten; dan
 8. Kurangnya tenaga mediator yang bersertifikat baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten se Kalimantan Timur.
- f. **Program Penyuluhan Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 3.537.377.859,- atau 91,88% dari pagu sebesar Rp. 3.850.000.000,-. Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%). Pada program didukung oleh 3 kegiatan yaitu:
- a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian
Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 25 orang atau 100% dari target 25 orang. Petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel 2.28. Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	4 Orang
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Orang
3.	Kabupaten Kutai Timur	7 Orang
4.	Kabupaten Kutai Barata	4 Orang
5.	Kabupaten PPU	2 Orang
6.	Kabupaten Paser	2 Orang
7.	Kabupaten Berau	4 Orang
	Total	25 Orang

b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 31 kelompok tani atau 100% dari target 31 kelompok tani.

Tabel 2.29. Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
1.	Lembah Subur	Kakao	Berau
2.	Bukit Harapan	Kakao	Berau
3.	Mantaruning Jaya	Kakao	Berau
4.	Apollo	Kakao	Berau
5.	Sukan Lestari	Kakao	Berau
6.	Guyup Rukun	Karet	Kutai Kartanegara
7.	Mekar Jaya	Karet	Kutai Kartanegara

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
8.	Karya Jaya	Karet	Kutai Kartanegara
9.	Mekar Baru	Karet	Kutai Kartanegara
10.	Karya Bersama	Karet	Kutai Kartanegara
11.	Sambung Jaya Maju	Karet	Kutai Kartanegara
12.	Maju Makmur	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
13.	Mekar Sari	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
14.	KWT Anisa Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
15.	Harapan Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
16.	Maju Terus	Kelapa Sawit	Kutai Barat
17.	Bina Marga	Kelapa Sawit	Kutai Barat
18.	Barokah	Kelapa Sawit	Kutai Barat
19.	Alas Panyom Bolum	Kelapa Sawit	Kutai Barat
20.	Bukit Babut	Kelapa Sawit	Kutai Barat
21.	Harapan Utama	Lada	Kutai Barat
22.	Karya Usaha	Lada	Kutai Barat
23.	Al-Ikhlas	Lada	Kutai Barat
24.	Trubus	Lada	Kutai Barat
25.	Lestari A	Lada	Kutai Barat
26.	Sumber Rejeki	Kelapa	Paser
27.	Balu Mulya	Lada	Paser
28.	Usaha Baru	Lada	Paser
29.	Tujur Betung	Karet	Paser

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
30.	Sederhana	Karet	Paser
31.	Mitra Tani	Pala	Berau

2. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit, yaitu teknologi diverfikasi kelapa.

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 20 lembaga atau 100% dari target 20 lembaga. Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel 2.30. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	1 Lembaga
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Lembaga
3.	Kabupaten Kutai Timur	5 Lembaga
4.	Kabupaten Kutai Barat	4 Lembaga
5.	Kabupaten PPU	2 Lembaga
6.	Kabupaten Paser	2 Lembaga
7.	Kabupaten Berau	4 Lembaga
	Total	20 Lembaga

2. Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI dengan capaian 7 kelompok tani atau 175% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:

- a. Kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- d. Kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
- e. Kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
- f. Kelompok tani Lalut Isau Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- g. Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan di atas didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 1 kegiatan (100%), yaitu kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) bagi Petugas Teknis Perkebunan/ Penyuluh Lapangan yang Membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur.
- b) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:
 - 1. Jumlah jenis olahan hasil perkebunan dengan capaian sebanyak 18 jenis olahan atau 360% dari target sebanyak 5 jenis olahan yaitu:
 - a. Produk Pangan sebanyak 17 jenis olahan terdiri dari : Kecap aren, Permen aren, Cheese cookies gula aren, Selai kolang kaling, Mie sagu, Kue lapis sagu, Kue sagu keju, Nata de coco KW, Kue sagon kelapa, Kembang gula kelapa, Minuman coklat Milk 3 in 1, Coklat conventure milk, Coklat compound, Pengolahan lada hijau, Pengolahan lada putih, Minuman jahe lada, dan Acar lada.
 - b. Produk Non Pangan sebanyak 1 jenis olahan yaitu Pengolahan Bokar
 - 2. Jumlah promosi yang diikuti target 10 event dengan realisasi 15 event atau 150%. Promosi yang diikuti tersebut antara lain:

Tabel 2.31. Promosi yang Diikuti Tahun 2021

No.	Event	Waktu Pelaksanaan
1.	Kaltim fair	15-19 Maret 2021
2.	Pembuatan Video Promosi	25 Mei-30 Juni 2021
3.	Bimtek E-Commerce	6-7 Juli 2021
4.	Pengembangan Informasi pasar (Buletin harga Pasar)	Januari-Desember 2021
5.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Planet Swalayan	17 April 2021
6.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Auto Swalayan	15 April 2021
7.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Yugo Market	6 September 2021
8.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Industri Perhotelan	Maret 2021
9.	Kaltim Expo	22-26 September 2021
10.	Workshop Pengolahan dan Pemasaran serta launching Toko Kebun Kaltim	25-27 Oktober 2021
11.	Mou tentang Promosi dan pemasaran Produk Olahan dan Non Olahan Komoditas Perkebunan Kalimantan Timur antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Hotel Four Point By Sheraton Balikpapan	26 Oktober 2021
12.	Espo Kuliner dan Launching Rumah Adat Lamin Anjungan Kaltim di TMII Jakarta	12-15 November 2021
13.	Sosialisasi dan Bimtek Jaminan Halal	17-18 November 2021
14.	Bazaar dan Wisata Kuliner HUT DWP ke-22	28 November-1 Desember 2021
15.	Forum Investasi Kalimantan Timur	7 Desember 2021

- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 20 pertemuan atau 100% dari target 20 pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain:

Tabel 2.32. Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	6	Pertemuan
2.	Kabupaten Kutai Barat	2	Pertemuan
3.	Kabupaten PPU	3	Pertemuan
4.	Kabupaten Paser	5	Pertemuan
5.	Kabupaten Berau	4	Pertemuan
	Total	20	Pertemuan

- d) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 24 lembaga atau 100% dari target 24 lembaga. Terdapat penambahan 4 lembaga dari tahun 2020 sebanyak 20 lembaga. Penambahan 4 lembaga tersebut yaitu:
- a. Kelompok Tani Anugerah Jemalay di Kabupaten Berau;
 - b. Kelompok Tani Sumber Ilahi Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. KUD Rangan di Kabupaten Paser; dan
 - d. KUD Sumber Rejeki di Kabupaten Paser.
- e) Pendampingan Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 9 unit atau 100% dari target 9 unit. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina antara lain:
- 1 MPIG Kampung Belayan dengan komoditi Gula Aren di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2 MPIG Lada Malonan dengan komoditi lada di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan dan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 3 MPIG Kakao Berau dengan komoditi kakao di Desa Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
 - 4 UPPB Semoga Jaya dengan komoditi karet di Desa Sukaraja Kec. Sepaku Kabupaten PPU;
 - 5 UPPB Jaya Mandiri dengan komoditi karet di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
 - 6 UPPB Etam Jaya dengan komoditi karet di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
 - 7 UPPB Gresik Bangkit dengan Komoditi karet di Kelurahan Gresik Kecamatan Penajam Kabupaten PPU;
 - 8 UPPB Jaya Barokah dengan komoditi karet di Desa Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda; dan
 - 9 UPPB Pampang Jaya dengan komoditi karet di Desa Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- f) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan untuk SNI. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 8 kali atau 133,33% dari target sebanyak 6 kali dengan realisasi 8 kali atau capaian kinerja 133%. Pengujian sampel produk hasil perkebunan tersebut antara lain:
- a. Pengujian Bokar sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
 - b. Pengujian mutu biji kakao sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara, kelompok tani Lalut Isau Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartaengara.
 - c. Pengujian aren sebanyak 2 kali dimana sampel tersebut berasal dari kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
- g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target kinerja yaitu jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai

sebanyak 1 pertemuan atau 100% dari 1 pertemuan, yaitu pertemuan Pelatihan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SL-PHT) komoditi Kakao yang diselenggarakan pada bulan April dan Juli di Kabupaten Berau.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.33. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	5,0	5,2	5,3	5,3	4,97*	5,2	5,3	5,3
a.	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	19.087	20.493	21.997	21.997	16.951,83*	20.493	21.997	21.997
b.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan)	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	53	58	63	63	62	58	63	63
c.	NTP pekebun (%)	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	108	110	112	112	151,04	110	112	112

*) Sumber: Angka Sangat Sementara 2021 (BPS Provinsi Kalimantan Timur)

***) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (Desember 2021)

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2.34 Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2013-2021)

Sektor/Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021 **	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,65	7,00	7,72	8,22	7,98	7,89	7,95	8,80	8,48	
	1	Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,36	4,55	5,35	5,35	5,36	5,25	5,31	5,98	5,88
	a	Tanaman Pangan	0,22	0,19	0,22	0,20	0,20	0,21	0,21	0,24	0,20
	b	Tanaman Hortikultura	0,26	0,33	0,34	0,36	0,33	0,34	0,35	0,39	0,34
	c	Tanaman Perkebunan	2,59	4,49	4,33	4,43	4,50	4,34	4,37	4,93	4,97
	d	Peternakan	0,25	0,26	0,31	0,32	0,30	0,31	0,33	0,37	0,32
	e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,11	1,16	1,33	1,34	1,16	1,17	1,12	1,15	1,04
3	Perikanan	1,18	1,30	1,50	1,54	1,45	1,48	1,53	1,67	1,56	

*Data angka sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

**Data angka sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

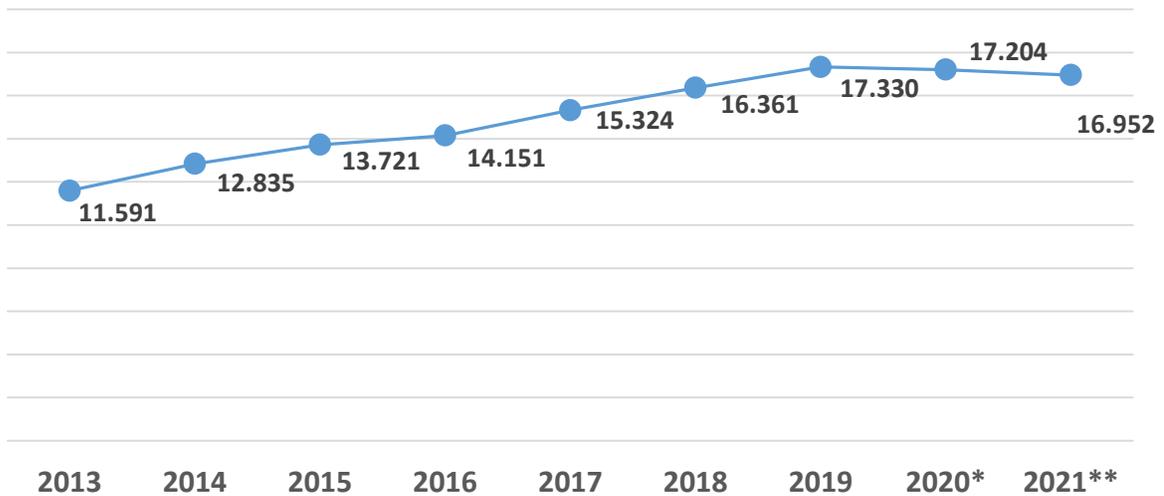
Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh sub sektor perkebunan yang selalu mengalami peningkatan. Angka sangat sementara tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,97% atau 58,61% dari PDRB sektor pertanian dalam arti luas.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,47% yang diakibatkan penurunan produksi di masa pandemi Covid-

19. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan pada tahun 2013 sampai dengan 2021:

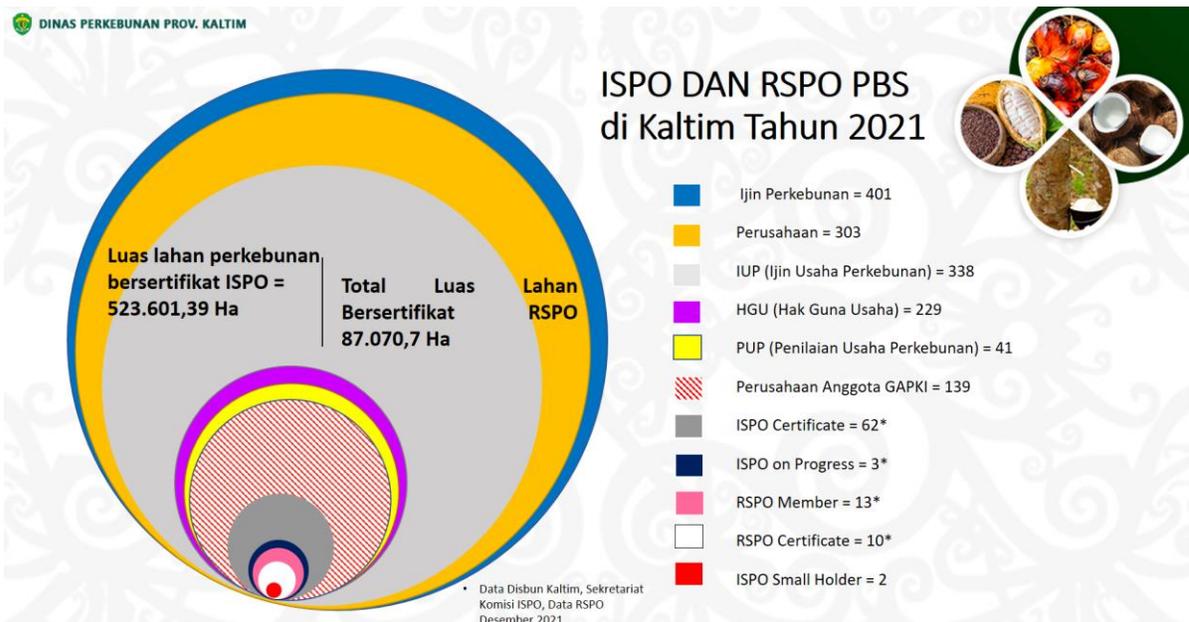
Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2021



Gambar 2.3

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2021

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan



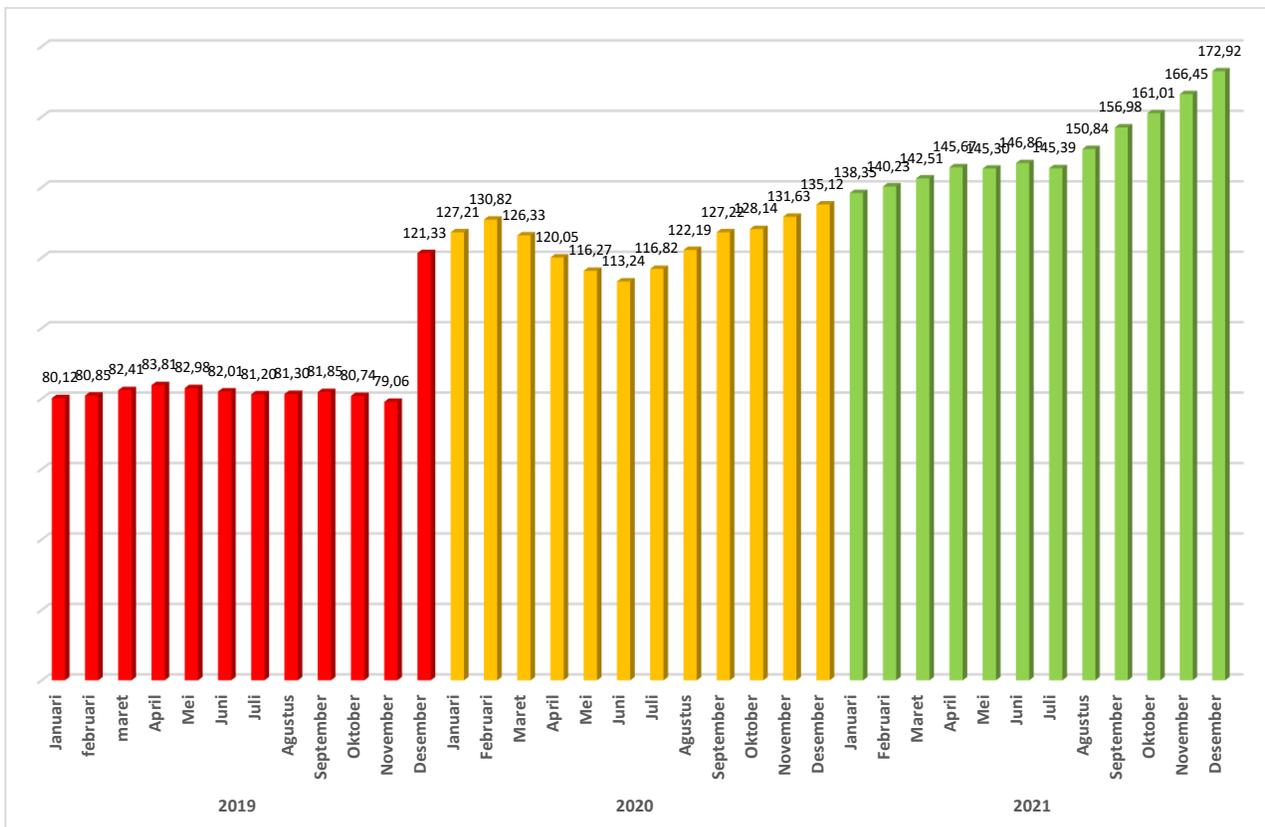
Gambar 2.4

ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.4, pada tahun 2021 dari 303 Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 62 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 523.601,39 HA atau sekitar 21,94% dari total IUP tahun 2021.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2021 rata-rata NTP sektor perkebunan dari Januari- November sebesar 149,05%. NTP subsektor perkebunan rakyat pada tahun 2021 terlihat cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan nilai NTP Petani Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari 2019 sampai dengan November 2021 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4
NTP Sektor Perkebunan Januari 2019-Desember 2021

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun

global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai ± 88,47% lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin

perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas \pm 2,74 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar \pm 1,54 Juta Ha atau 56,20% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada \pm 43,80 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2021, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 401 ijin seluas 2.748.708 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.386.496 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2021 adalah 1.359.415 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bawa terdapat \pm 1,5 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

**Tabel 2.35 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2021
Oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan**

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibeberani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Berau	281.725	204.725	133.133	174.367
2	Kutai Timur	817.659	747.930	396.338	390.782
3	Kutai Kertanegara	490.215	485.031	185.363	144.799
4	Kutai Barat	562.355	473.050	265.295	139.016
5	Mahakam Ulu	150.573	138.760	59.202	22.878
6	Penajam Paser Utara	82.552	82.028	29.258	29.990
7	Paser	363.629	253.973	154.943	103.859

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibebeani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	-
	Jumlah	2.748.708	2.386.496	1.223.531	1.005.691

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;
- c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;

- f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik;
- g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial; dan
- h. Belum dilakukannya pencabutan izin atau pencabutan hak atas tanah pada perusahaan perkebunan yang tidak merealisasikan penanamannya.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,33% (4,94% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2014-2021 pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2021

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Potensi berdasarkan PDKP

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)								Potensi berdasarkan PDKP
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kelapa Sawit	14.76	17.39	14.95	16.69	16.60	20.77	17.37	17,16	20.00
Karet	1.38	1.30	1.30	1.28	1.22	1.08	1.07	1,28	1.67
Kakao	0.71	0.77	0.55	0.50	0.55	0.57	0.61	0,51	1.00
Kelapa Dalam	0.56	0.68	0.63	0.80	0.75	0.67	0.47	0,64	1.50
Lada	1.03	1.06	0.72	0.99	1.05	0.91	0.64	0,72	1.20
Kopi	0.23	0.22	0.24	0.26	0.24	0.21	0.23	0,25	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS;
- e. Penggunaan benih yang ilegal;
- f. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- g. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 162.592 Ha pada tahun 2020. Masih rendahnya pertumbuhan komoditi non sawit disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya;
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani;
- e. Berkurangnya tenaga kerja pekebun; dan
- f. Terbatasnya lahan karena didominasi oleh perijinan usaha kelapa sawit.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya dibarengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)*, kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk *crumb rubber*, walaupun untuk *Palm Kernel Oil (PKO)* masih belum optimal diproduksi.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan;
- c. Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar;

- d. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;
- e. Kurangnya sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- f. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- g. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- h. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan
- i. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

5. Meningkatkan tuntutan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari

perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional, nasional dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. *Supply Chain* produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam;
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal karena belum didukung oleh kebijakan ketenagalistrikan; dan

- i. Pengelolaan kawasan ANKT di kawasan perkebunan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan belum didukung oleh deskripsi data yang rinci dan terintegrasi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Sistem pengelolaan data belum mengarah kepada integrasi pelaksanaan program kegiatan.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;
- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal;
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana;
- g. Belum terbentuknya lembaga korporasi pekebun; dan
- h. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan kelembagaan pekebun.

8. Terdampaknya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus corona atau Covid-19 di dunia, termasuk ke Indonesia berdampak ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Mulai dari pariwisata hingga perdagangan, termasuk sektor pertanian. Namun demikian sektor perkebunan mampu bertahan dan dapat tumbuh positif serta menjadi penggerak dan pemulih ekonomi di masa Covid-19. Sub sektor perkebunan memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Kalimantan Timur bertahan dari kontraksi ekonomi. Hal tersebut karena sektor perkebunan memproduksi kebutuhan primer yang selalu menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian dampak covid-19 menyebabkan terganggunya usaha perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dari terjadinya perubahan supply dan demand yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan ditingkat petani.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Terdampaknya usaha perkebunan akibat Covid-19**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

a. Fluktuasi Harga Pasar

Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk “Jarak Sosial,” mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas *supply* dan *demand* barang dan jasa serta harga yang dimungkinkan meningkat.

b. Rantai Pasokan Melambat dan Kekurangan

Karena logistik terganggu dan upaya-upaya memperlambat penyebaran virus, seperti penurunan *supply* dan *demand* CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan *lockdown*.

c. Kesehatan Petani

Petani adalah populasi yang relatif lebih tua, dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus pada pelaku agri tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata operator pertanian hampir 58 tahun usianya, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas. 11,7% penuh dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas. Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani dampaknya dan menimbulkan kepanikan aktivitas akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada.

d. Meningkatnya PHK dan Pengangguran

Terjadinya penurunan jumlah pekerja di beberapa usaha perkebunan akibat diterapkannya protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

9. Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau untuk IKN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya juga menyangkut atau bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal ini merupakan peluang bagi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasis kelapa sawit seperti yang tertuang dalam RPJMN dan RKP tahun 2022.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi CPO kelapa sawit sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,89 juta Ton. Namun demikian masih ditemui kendala dalam hal mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit. Sementara itu, untuk komoditas lainnya seperti: kakao, aren, lada, dan kelapa dalam dirasa belum mencukupi dalam aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau IKN**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Produksi komoditas non sawit masih belum tercukupi luas dan produktivitasnya;
- b. Minat investasi masih didominasi oleh usaha pembangunan kebun dan sangat sedikit investasi pada industri pengolahan;

- c. Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang menghambat minat investor untuk berinvestasi di industri pengolahan subsektor perkebunan; dan
- d. Kebijakan dan regulasi di sektor energi dan listrik menghambat inisiatif perusahaan perkebunan untuk mengembangkan energi berbasis bio massa dan limbah kelapa sawit.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki :

- Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk pengembangan subsektor perkebunan;
- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
- Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
- Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.

2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki :

- Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
- Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;

- Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan
- Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
- Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;
- Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun; dan
- Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.

4. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki :

- Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
- Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
- Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
- Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan;
- Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;

- Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
- Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
- Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
- Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
- b. Pemberdayaan kualitas dan peningkatan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja, baik internal maupun eksternal;
- d. Optimalisasi pemanfaatan pola ruang subsektor perkebunan;
- e. Fokus pada pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi yang mengintegrasikan aspek hulu hilir;
- f. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan secara berkelanjutan;
- g. Peningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang konkrit, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- i. Penguatan kelembagaan yang menangani sub sector perkebunan di Kabupaten/Kota; dan
- j. Tersedia nya anggaran yang memadai untuk pencapaian target indikator Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel TC. 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

TABEL T-C29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERKEBUNAN									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	92 %	-	86 %	89 %	117	89 %	89	97
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	-	70	72,63	104	72	72	97
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	20 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	20	100
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	8 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8	100
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12	100
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	56 Dokumen	-	28 Dokumen	28 Dokumen	100	28 Dokumen	56	100
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	24 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24	100
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	-	20 %	20 %	100	20 %	40	67
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	100 Orang	-	50 Orang	49 Orang	98	50 Orang	99	99
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5	100
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Unit	-	114 Unit	114 Unit	100	-	114	100
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12 Bulan		
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	4 Unit	4 Unit	100	12 Bulan	12	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)				11=(10/4)
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	-	-	12	100
		Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	94.480 Lembar	-	47.240	Lembar	47.240	Lembar	100	47.240	Lembar	94.480	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1500 Eksemplar	-	1.500	Eksemplar	1.500	Eksemplar	100	-	-	1.500	100
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4 Kegiatan	-	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100	-	-	4	100
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	22 Jenis	-	8	Jenis	8	Jenis	100	8	Jenis	16	73
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	49 Unit	-	34	Unit	34	Unit	100	15	Unit	49	100
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.750 Lembar	-	750	Lembar	750	Lembar	100	3.000	Lembar	3.750	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	1	100
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39 Unit	-	21	Unit	21	Unit	100	18	Unit	39	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	4	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	30 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	21	Unit	30	100
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25 Ton	-	17.136.849	Ton	17.461.751	Ton	102	18.126.490	Ton	18.126.490	99
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504 Ton	-	17.036.402	Ton	17.375.224	Ton	102	18.020.894	Ton	18.020.894	99
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000 Ton	-	77.763	Ton	70.010	Ton	90	81.651	Ton	81.651	91
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853 Ton	-	12.479	Ton	10.164	Ton	81	12.500	Ton	12.500	97
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000 Ton	-	3.771	Ton	2.180	Ton	58	4.368	Ton	4.368	87
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517 Ton	-	6.434	Ton	4.173	Ton	65	7.077	Ton	7.077	83
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25 Ton	-	0,15	Ton	0	Ton	100	0,20	Ton	0,20	80
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha	-	18	Ton/Ha	16,11	Ton/Ha	88	19	Ton/Ha	19	96
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	67
		Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/ha	-	20,00	Ton /Ha	17,3	Ton /Ha	87	21,00	Ton/Ha	21,00	95
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,5 Ton/ha	-	1,40	Ton/Ha	1,32	Ton/Ha	94	1,45	Ton/Ha	1,45	97
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,9 Ton/ha	-	0,82	Ton/Ha	0,64	Ton/Ha	78	0,85	Ton/Ha	0,85	94

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021					8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/ha	-	0,75	Ton/Ha	0,52	Ton/Ha	69	0,80	Ton/Ha	0,80	94
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,2 Ton/ha	-	1,18	Ton/Ha	0,72	Ton/Ha	61	1,19	Ton/Ha	1,19	99
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 Ha	-	1.425.580	Ha	1.517.300	Ha	106	1.462.645	Ha	1.462.645	97
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	90 Kelompok Tani	-	30	Kelompok Tani	34	Kelompok Tani	113	30	Kelompok Tani	64	71
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	1.910 Ha	-	670	Ha	670	Ha	100	595	Ha	1.265	66
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	500 Ha	-	200	Ha	200	Ha	100	150	Ha	350	70
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	300 Ha	-	100	Ha	100	Ha	100	100	Ha	200	67
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	60 Ha	-	20	Ha	20	Ha	100	20	Ha	40	67
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	300 Ha	-	100	Ha	100	Ha	100	100	Ha	200	67
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	550 Ha	-	200	Ha	200	Ha	100	150	Ha	350	64
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	150 Ha	-	50	Ha	50	Ha	100	50	Ha	100	67
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton Co2eq	-	4	Ton CO2eq	6,73	Juta Ton CO2eq	165	4,07	Juta Ton CO2eq	4	101
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 Pelaku Usaha	-	128	Pelaku Usaha	128	Pelaku Usaha	100	130	Pelaku Usaha	130	98
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	15 Pelaku Usaha	-	5	Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha	100	5	Pelaku Usaha	10	67
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	3 PMS	-	1	PMS	1	PMS	100	1	PMS	2	67
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	-	102.000	Ha	102.038	Ha	100	102.500	Ha	102.500	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	15 Konflik	-	5 Konflik	5 Konflik	100	5 Konflik	10	67
		Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	45 KTPA	-	15 KTPA	20 KTPA	133	15 KTPA	35	78
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	105 Perusahaan	-	35 Perusahaan	41 Perusahaan	117	35 Perusahaan	76	72
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	-	87 Perusahaan	89 Perusahaan	102	97 Perusahaan	97	91
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	-	35 Lembaga Pekebun	35 Lembaga Pekebun	100	45 Lembaga Pekebun	45	82
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	156 Perusahaan	-	52 Perusahaan	54 Perusahaan	104	52 Perusahaan	106	68
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	3 Lembaga	-	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	2	67
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	75 Orang	-	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	50	67
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2	67
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	93 Kelompok Tani	-	31 Kelompok Tani	31 Kelompok Tani	100	31 Kelompok Tani	62	67
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2	67
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	12 Unit	-	-	-	-	5 Unit	-	-
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5 Jenis	-	5 Jenis	18 Jenis	360	- Jenis	18	360

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	10 Produk					5 Produk					
		Jumlah promosi yang diikuti	10 Event	-	10	Event	15	Event	150	-	Event	15	150
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	20 Produk							9	Produk		
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	60 Pertemuan	-	20	Pertemuan	20	Pertemuan	100	20	Pertemuan	40	67
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	60 Lembaga	-	20	Lembaga	20	Lembaga	100	20	Lembaga	40	67
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	12 Kelompok Tani	-	4	Kelompok Tani	8	Kelompok Tani	200	4	Kelompok Tani	12	100
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	-	24	Lembaga	24	Lembaga	100	28	Lembaga	52	163
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	21 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	5	Unit	14	67
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)					5	Pelaku Usaha					
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	18 Kali	-	6	Kali	8	Kali	133	6	Kali	14	78
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3 Pertemuan	-	1	Pertemuan	1	Pertemuan	100	1	Pertemuan	2	67
UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)													
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	-	86	%	82,39	%	96	89 %		89	97
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	-	20	%	100	%	500	20 %	120	200
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	31 Orang	-	18	Orang	17	Orang	94	13 Orang	30	97
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	-	3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	3	100
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Unit	-	12	Bulan	12	Bulan	100	-	12	100
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan							12 Bulan		
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	-	4	Unit	4	Unit	100	-	4	100
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12		
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	12	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1000 Lembar	-	500	Lembar	500	Lembar	100	500 Lembar	1.000	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 Eksemplar	-	720	Eksemplar	720	Eksemplar	100	-	720	100
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan							12 Bulan		
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	-	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	-	2	100
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	18 Jenis	-	6	Jenis	6	Jenis	100	6	Jenis	12	67
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	30 Unit	-	15	Unit	15	Unit	100	15	Unit	30	100
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	480 Lembar	-	240	Lembar	240	Lembar	100	240	Lembar	480	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	200
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	-	4	Unit	4	Unit	100	-	-	4	100
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	200
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	4	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	8 Unit	-	4	Unit	4	Unit	100	4	Unit	8	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	17 Unit	-	4	Unit	4	Unit	100	13	Unit	17	100
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	18.000.000 Benih	-	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000	Benih	12.121.600	67
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	18.000.000 Benih	-	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000	Benih	12.121.600	67

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	6.000.000 Benih						3.000.000 Benih				
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	-	3.000.000	Benih	2.343.046	Benih	78	-	2.343.046	78	
		Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,58 %	-	2,58	%	2,51	%	97	-	3	97	
		Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47000 Benih							47000 Benih			
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana kantor yang tersedia	2 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	-	2	100	
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	2 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	-	2	100	
3.27.003.1.01.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	2 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	-	2	100	
	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)										-		
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	-	86	%	84	%	98	89	%	89	97
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	-	20	%	50	%	250	20	%	70	117
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	16 Orang	-	8	Orang	6	Orang	75	8	Orang	14	88
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	-	3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	3	100
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	-	75	Unit	75	Unit	100	-	-	75	100
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan							12	Bulan		

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	1	100
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	26.200 Lembar	-	13.100	Lembar	13.100	Lembar	100	13.100	Lembar	26.200	100
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan		2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	-	-	2	100
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	19 Jenis	-	9	Jenis	9	Jenis	100	5	Jenis	14	74
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	38 Unit	-	21	Unit	21	Unit	100	17	Unit	38	100
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	790 Lembar	-	395	Lembar	395	Lembar	100	395	Lembar	790	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	1	100
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	14 Unit	-	4	Unit	4	Unit	100	10	Unit	14	100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rupiah	-	1.047.138.860	Rupiah	1.044.792.912	Rupiah	100	916.648.000	Rupiah	916.648.000	118
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	-	220	Ha	220	Ha	100	195	ha	195	125
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	6 Jenis	-	2	Jenis	2	Jenis	100	2	Jenis	4	67
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	2.000 Kg	-	1.000	Kg	0	Kg	-	1.000	Kg	1.000	50
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	1800 Liter	-	600	Liter	600	Liter	100	600	Liter	1.200	67
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	6 Lembaga	-	2	Lembaga	2	Lembaga	100	2	Lembaga	4	67
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	-	220	Ha	220	Ha	100	195	Ha	195	125
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)													
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	-	86	%	87,98	%	102	89 %	89	97	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	-	20	%	20	%	100	20 %		40	67
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	-	15	Orang	14	Orang	93	10	Orang	24	96
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	-	3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	3	100
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88 Unit	-	88	Buah	88	Buah	100	-	-	88	100
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	1	100
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5.960 Lembar	-	2.960	Lembar	2.960	Lembar	100	3.000	Lembar	5.960	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eksemplar	-	12	Eksemplar	12	Eksemplar	100	-	-	12	100
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	15 Kegiatan	-	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100	-	-	15	100
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan							12	Bulan		

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	-	Jenis	3	100
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	-	Unit	9	100
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	510 Lembar	-	210	Lembar	210	Lembar	100	300	Lembar	510	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	1	100
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan							12	Bulan		
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	-	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	3	100
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	4	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	-	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	26 Unit	-	13	Unit	13	Unit	100	13	Unit	26	100
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk pekebun rakyat	85 %	-	75	%	92,32	%	123	80 %		80	94

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	155.000 Benih	-	55.000	Benih	55.000	Benih	100	50.000 Benih	105.000	68
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	60.000 Benih	-	20.000	Benih	20.000	Benih	100	30.000 Benih	50.000	83
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	30.000 Benih	-	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	20.000	67
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	30.000 Benih	-	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	20.000	67
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	95.000 Benih	-	35.000	Benih	35.000	Benih	100	10.000 Benih	45.000	47
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	15.000 Benih	-	10.000	Benih	10.000	Benih	100	20.000 Benih	30.000	200
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	20.000 Benih	-	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	20.000	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih	-					-		-	-
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih	-					-		-	-
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	40.000 Benih	-	15.000	Benih	15.000	Benih	100	10.000 Benih	25.000	63

Samarinda, 2022

KEPALA,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi;
2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
3. Status dan luas kepemilikan lahan;
4. Pendidikan dan usia petani;
5. Kemiskinan pedesaan;
6. Dampak disrupsi revolusi industri 4.0;
7. Dampak perubahan iklim (DPI); dan
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: ***"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah ***"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"***.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional di antaranya adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- a) Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI; f) Memperpendek rantai pasok; g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan i) Inovasi pertanian bioindustry.
- b) Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia.

Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan pemasaran dan investasi; b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil; c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian; e) Penguatan sistem perkarantinaan; f) Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

- c) Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian; d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.
- d) Arah kebijakan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi

informasi dan komunikasi; d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan f) Penguatan kelembagaan petani.

e) Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional



Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana

kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

- a) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
- b) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- c) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- d) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
- e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
- f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan.

III.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Starategi (Renstra) dan Perubahan Renstra 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
 - b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
 - c. Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa covid 19
 - Mendorong usaha perkebunan sebagai penopang ekonomi
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
 - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
 - b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
 - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
 - c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
 - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
 - d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
 - e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan

- Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
- f. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan Penanganan hama dan penyakit
- Efektivitas mitigasi emisi GRK
 - Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan
 - Penanganan pengendalian kebakaran lahan perkebunan
 - Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan
- g. Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT
- Penanganan hama dan penyakit
 - Pengembangan APH dan Biopestisida
- h. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
- i. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
- pekebun rakyat
 - Memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha perkebunan
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan perkebunan
- j. Peningkatan fasilitasi pembangunan kebun rakyat
- Pemberian bantuan padat karya pada pembangunan perkebunan rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai PDRB sub sektor perkebunan, dengan indikator :

- Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

b. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :

- NTP Perkebunan Rakyat (%)

III.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran / pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2023, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi 7 kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Rugas dan Fungsi.
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah, meliputi 6 sub kegiatan
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi 1 sub kegiatan
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 4 sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi 2 kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi 1 kegiatan :

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi 1 kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi 3 sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi 1 kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi 3 kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi 4 sub kegiatan:
 - a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;
 - b) Pendampingan Manajemen Koorporasi petani;
 - c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani; dan
 - d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2023 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 52.000.000.000,-** (*Lima Puluh Dua Miliyar Rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp. 43.904.550.650,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.496.308.950,- UPTD P2TP sebesar Rp. 3.197.333.000,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 2.401.807.400,- (Tabel TC. 33)

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dinas Perkebunan				43.904.550.650			43.904.550.650
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		92%	23.611.237.650	APBD	92%	23.611.237.650
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		74	1.774.925.300		74	1.774.925.300
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>802.771.000</i>		<i>10 Dokumen</i>	<i>802.771.000</i>
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>972.154.300</i>		<i>4 Laporan</i>	<i>972.154.300</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	15.359.114.750		12 Bulan	15.359.114.750
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>79 Orang/Bulan</i>	<i>14.906.274.750</i>		<i>79 Orang/Bulan</i>	<i>14.906.274.750</i>
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>452.840.000</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>452.840.000</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	936.032.000		20%	936.032.000
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Paket</i>	<i>352.032.000</i>		<i>1 Paket</i>	<i>352.032.000</i>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Samarinda	50 Orang	584.000.000		50 Orang	584.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		5 Unit	1.716.947.254		5 Unit	1.716.947.254
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	35.991.708		4 Paket	35.991.708
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	167.310.000		4 Paket	167.310.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	352.514.181		4 Paket	352.514.181
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	69.731.365		4 Paket	69.731.365
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Samarinda	12 Dokumen	9.600.000		12 Dokumen	9.600.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	1 Laporan	1.081.800.000		1 Laporan	1.081.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		6 Jenis	227.407.500		6 Jenis	227.407.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	9 Unit	227.407.500		9 Unit	227.407.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	2.634.801.146		3 Jenis	2.634.801.146
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	30.000.000		1 Laporan	30.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	494.401.410		1 Laporan	494.401.410
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Samarinda	1 Laporan	304.192.000		1 Laporan	304.192.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	1.806.207.736		1 Laporan	1.806.207.736
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara Daerah		3 Jenis	962.009.700		3 Jenis	962.009.700
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	18 Unit	400.217.700		18 Unit	400.217.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	2 Unit	349.932.000		2 Unit	349.932.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	21 Unit	211.860.000		21 Unit	211.860.000
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)		18.313.874,25	6.965.557.600	APBD	18.313.874,25	6.965.557.600
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)		18.197.504			18.197.504	
	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)		90.000			90.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)		12.853			12.853	
	Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)		5.000			5.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan (lada)		8.517			8.517	
	Produksi Komoditi Perkebunan (pala)		0,25			0,25	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis		20,03 Ton/Ha	6.965.557.600		20,03 Ton/Ha	6.965.557.600
<i>Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian</i>	<i>Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	<i>22 Ton/Ha</i>	<i>6.965.557.600</i>		<i>22 Ton/Ha</i>	<i>6.965.557.600</i>
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)</i>		<i>1,50 Ton/Ha</i>			<i>1,50 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)</i>		<i>0,90 Ton/Ha</i>			<i>0,90 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)</i>		<i>0,85 Ton/Ha</i>			<i>0,85 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)</i>		<i>1,20 Ton/Ha</i>			<i>1,20 Ton/Ha</i>	
	<i>Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian</i>		<i>1 Dokumen</i>			<i>1 Dokumen</i>	
	<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>		<i>1 Laporan</i>			<i>1 Laporan</i>	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)		30	7.222.948.500	APBD	30	7.222.948.500
	Luas kebun yang dibangun (Ha)		1.500.674			1.500.674	
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)		645 Ha	7.222.948.500		645 Ha	7.222.948.500
<i>Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian</i>	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	<i>150 Ha</i>	<i>7.222.948.500</i>		<i>150 Ha</i>	<i>7.222.948.500</i>
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)</i>		<i>100 Ha</i>			<i>100 Ha</i>	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)</i>		<i>20 Ha</i>			<i>20 Ha</i>	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)</i>		<i>100 Ha</i>			<i>100 Ha</i>	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Keruing)		200 Ha			200 Ha	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)		50 Ha			50 Ha	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)		25 Ha			25 Ha	
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		1 Dokumen			1 Dokumen	
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000	APBD	4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:		137	1.120.000.000		137	1.120.000.000
	a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)		132			132	
	b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)		5			5	
<i>Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	<i>1 PMS</i>	<i>585.660.000</i>		<i>1 PMS</i>	<i>585.660.000</i>
	<i>Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi</i>		<i>103.000 Ha</i>			<i>103.000 Ha</i>	
	<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)</i>		<i>9.317 Ha</i>			<i>9.317 Ha</i>	
<i>Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	<i>Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	<i>15 KTPA</i>	<i>534.340.000</i>		<i>15 KTPA</i>	<i>534.340.000</i>
	<i>Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani</i>		<i>5 Konflik</i>			<i>5 Konflik</i>	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)		150 Ha			150 Ha	
Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35 Perusahaan	750.000.000	APBD	35 Perusahaan	750.000.000
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	107 Perusahaan	750.000.000		107 Perusahaan	750.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	55 Lembaga Pekebun	750.000.000		55 Lembaga Pekebun	750.000.000
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina		52 Perusahaan			52 Perusahaan	
	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)		1 Laporan			1 Laporan	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)		1 Lembaga	4.234.806.900	APBD	1 Lembaga	4.234.806.900
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)		25 Orang	312.046.900		25 Orang	312.046.900
Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Kegiatan	312.046.900		1 Kegiatan	312.046.900
	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		15 Orang			15 Orang	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)		31 KT	1.877.575.000		31 KT	1.877.575.000
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)		1 Unit			1 Unit	
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan		7 Unit			7 Unit	
Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	5 produk	1.343.750.000		5 produk	1.343.750.000
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)		11 Produk			11 Produk	
	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		1 Dokumen			1 Dokumen	
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	20 Pertemuan	533.825.000		20 Pertemuan	533.825.000
	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		10 Kelompok			10 Kelompok	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)		20 Lembaga	2.045.185.000		20 Lembaga	2.045.185.000
	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)		4 KT			4 KT	
Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	32 Lembaga	552.475.000		32 Lembaga	552.475.000
	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)		1 Unit			1 Unit	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	7 Unit	993.750.000		7 Unit	993.750.000
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)		7 pelaku usaha			7 pelaku usaha	
	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)		1 Laporan			1 Laporan	
Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	6 Kali	262.500.000		6 Kali	262.500.000
	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)		1 Unit			1 Unit	
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Pertemuan	236.460.000		1 Pertemuan	236.460.000
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)		1 Unit			1 Unit	
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				2.496.308.950			2.496.308.950
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		92%	1.460.138.650	APBD & DAK	92%	1.460.138.650
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	92.520.000		1 Dokumen	92.520.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	158.990.000		20%	158.990.000
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	<i>Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi</i>	13 Orang	158.990.000		13 Orang	158.990.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		3 Unit	294.022.117		3 Unit	294.022.117
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	4 Paket	4.500.000		4 Paket	4.500.000
<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	4 Paket	24.980.000		4 Paket	24.980.000
<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	4 Paket	61.701.617		4 Paket	61.701.617
<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	4 Paket	7.000.500		4 Paket	7.000.500
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	<i>Samarinda</i>	12 Dokumen	3.840.000		12 Dokumen	3.840.000
<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	1 Laporan	192.000.000		1 Laporan	192.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		6 Jenis	334.506.200		6 Jenis	334.506.200
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	15 Unit	334.506.200		15 Unit	334.506.200

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	435.339.733		3 Jenis	435.339.733
<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2.400.000</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>2.400.000</i>
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>86.977.605</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>86.977.605</i>
<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>188.750.000</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>188.750.000</i>
<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>157.212.128</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>157.212.128</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara Daerah		3 Jenis	144.760.600		3 Jenis	144.760.600
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Unit</i>	<i>35.910.600</i>		<i>2 Unit</i>	<i>35.910.600</i>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4 Unit</i>	<i>90.000.000</i>		<i>4 Unit</i>	<i>90.000.000</i>
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>13 Unit</i>	<i>18.850.000</i>		<i>13 Unit</i>	<i>18.850.000</i>
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar		6.000.000 Benih	1.036.170.300	APBD	6.000.000 Benih	1.036.170.300
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi		6.000.000 Benih	1.036.170.300		6.000.000 Benih	1.036.170.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	3.000.000 Benih	461.297.250		3.000.000 Benih	461.297.250
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		150 Sertifikat			150 Sertifikat	
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	47.000 Benih	574.873.050		47.000 Benih	574.873.050
	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)		1 Laporan			1 Laporan	
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.197.333.000			3.197.333.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		92%	1.944.904.600	APBD	92%	1.944.904.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	92.520.000		1 Dokumen	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	95.200.000		20%	95.200.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	6 Orang	95.200.000		6 Orang	95.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		3 Unit	309.980.917		3 Unit	309.980.917
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	10.699.946		4 Paket	10.699.946
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	17.600.000		4 Paket	17.600.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	77.777.300		4 Paket	77.777.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	24.783.671		4 Paket	24.783.671
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Samarinda	12 Dokumen	5.120.000		12 Dokumen	5.120.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutub, Mahkota dan	1 Laporan	174.000.000		1 Laporan	174.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		5 Jenis	367.934.800		5 Jenis	367.934.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Samarinda	17 Unit	367.934.800		17 Unit	367.934.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	495.410.883		3 Jenis	495.410.883
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	3.950.000		1 Laporan	3.950.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	185.782.355		1 Laporan	185.782.355

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	148.466.400		1 Laporan	148.466.400
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	157.212.128		1 Laporan	157.212.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara Daerah		3 Jenis	583.858.000		3 Jenis	583.858.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	1 Unit	35.510.000		1 Unit	35.510.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1 Unit	509.328.000		1 Unit	509.328.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	10 Unit	39.020.000		10 Unit	39.020.000
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)		774.940.000	1.252.428.400	APBD	774.940.000	1.252.428.400
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)		156 Ha	1.252.428.400		156 Ha	1.252.428.400
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	156 Ha	1.252.428.400		156 Ha	1.252.428.400
	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)		2 Lembaga			2 Lembaga	
	Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)		1.000 KG			1.000 KG	
	Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)		600 Liter			600 Liter	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)		2 Jenis			2 Jenis	
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				2.401.807.400			2.401.807.400
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		92%	983.464.992	APBD	92%	983.464.992
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>92.520.000</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>92.520.000</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	95.360.000		20%	95.360.000
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	<i>Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi</i>	<i>7 Orang</i>	<i>95.360.000</i>		<i>7 Orang</i>	<i>95.360.000</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu		3 Unit	268.815.973		3 Unit	268.815.973
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4 Paket</i>	<i>2.703.273</i>		<i>4 Paket</i>	<i>2.703.273</i>
<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Paket</i>	<i>2.475.000</i>		<i>2 Paket</i>	<i>2.475.000</i>
<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4 Paket</i>	<i>61.165.200</i>		<i>4 Paket</i>	<i>61.165.200</i>
<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Paket</i>	<i>5.552.500</i>		<i>2 Paket</i>	<i>5.552.500</i>
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>1.920.000</i>		<i>12 Dokumen</i>	<i>1.920.000</i>
<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutubintang</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>195.000.000</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>195.000.000</i>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	407.984.019		3 Jenis	407.984.019
<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3.000.000</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>92.987.659</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>92.987.659</i>
<i>Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>129.231.200</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>129.231.200</i>
<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>182.765.160</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>182.765.160</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara Daerah		3 Jenis	118.785.000		3 Jenis	118.785.000
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Unit</i>	<i>36.510.000</i>		<i>2 Unit</i>	<i>36.510.000</i>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1 Unit</i>	<i>44.000.000</i>		<i>1 Unit</i>	<i>44.000.000</i>
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>13 Unit</i>	<i>38.275.000</i>		<i>13 Unit</i>	<i>38.275.000</i>
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		85%	1.418.342.408	APBD	85%	1.418.342.408
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan		50.000 Benih	1.418.342.408		50.000 Benih	1.418.342.408

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan</i>	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	<i>Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim</i>	30.000 Benih	<i>1.418.342.408</i>		30.000 Benih	<i>1.418.342.408</i>
	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)</i>		<i>15.000 Benih</i>			<i>15.000 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)</i>		<i>0 Benih</i>			<i>0 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)</i>		<i>10.000 Benih</i>			<i>10.000 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)</i>		<i>5.000 Benih</i>			<i>5.000 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)</i>		<i>0 Benih</i>			<i>0 Benih</i>	
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah		20.000 Benih			20.000 Benih	
	<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)</i>		<i>10.000 Benih</i>			<i>10.000 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)</i>		<i>10.000 Benih</i>			<i>10.000 Benih</i>	
	<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)</i>		<i>0 Benih</i>			<i>0 Benih</i>	
	<i>Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan)</i>		<i>1 Laporan</i>			<i>1 Laporan</i>	
				52.000.000.000			52.000.000.000

Samarinda, 2022
KEPALA,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2023. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2023.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2023 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.06	Dinas perkebunan	Rp. 52.000.000.000,-
3..27.3.27.0.0.0.06	Dinas perkebunan	Rp. 43.904.550.650,-
3..27.3.27.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	Rp. 2.496.308.950,-
3..27.3.27.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Rp. 3.197.333.000,-
3..27.3.27.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	Rp. 2.401.807.400,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SilPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
DINAS PERKEBUNAN					43.904.550.650						43.904.550.650
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	23.611.237.650	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	23.611.237.650	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	1.774.925.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	1.774.925.300	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	802.771.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	802.771.000	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	972.154.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	972.154.300	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.359.114.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.359.114.750	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/Bulan	14.906.274.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/Bulan	14.906.274.750	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	452.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	452.840.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	936.032.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	936.032.000	
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	352.032.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Paket	352.032.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50 Orang	584.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50 Orang	584.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.716.947.254	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.716.947.254	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	35.991.708	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	35.991.708	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	167.310.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	167.310.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	352.514.181	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	352.514.181	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	69.731.365	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	69.731.365
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.600.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.081.800.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.081.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	227.407.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	227.407.500
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9 Unit	227.407.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9 Unit	227.407.500
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.634.801.146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.634.801.146
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	30.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	494.401.410	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	494.401.410
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	304.192.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	304.192.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1.806.207.736	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1.806.207.736
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	962.009.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	962.009.700
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18 Unit	400.217.700	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18 Unit	400.217.700
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	349.932.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	349.932.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21 Unit	211.860.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21 Unit	211.860.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	6.965.557.600	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	6.965.557.600
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504	
			Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000				Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000				Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000	
			Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517				Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517	
			Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25				Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha	6.965.557.600	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha	6.965.557.600
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/Ha	6.965.557.600	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/Ha	6.965.557.600
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,50 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,50 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,90 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,90 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,20 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,20 Ton/Ha	
			Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen				Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1 Laporan				Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1 Laporan	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	7.222.948.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	7.222.948.500
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674				Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	645 Ha	7.222.948.500	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	645 Ha	7.222.948.500
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	7.222.948.500	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	7.222.948.500
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen				Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	1.120.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	1.120.000.000
			a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132				a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132	
			b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5				b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	585.660.000	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	585.660.000
			Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha				Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9.317 Ha				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9.317 Ha	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	534.340.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	534.340.000
			Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik				Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	
			Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	150 Ha				Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	750.000.000	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	750.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	107 Perusahaan	750.000.000	Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	107 Perusahaan	750.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	750.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	750.000.000
			Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan				Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	
			Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan				Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.234.806.900	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.234.806.900
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	312.046.900	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	312.046.900
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	312.046.900	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	312.046.900
			Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang				Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang	
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.877.575.000	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.877.575.000
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit				Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	1.343.750.000	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	1.343.750.000
			Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	11 Produk				Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	11 Produk	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen				Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	533.825.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	533.825.000
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok				Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	2.045.185.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	2.045.185.000
			Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	552.475.000	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	552.475.000
			Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit				Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	993.750.000	Pendampingan manajemen koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	993.750.000
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	7 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	7 pelaku usaha	
			Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani (Laporan)	1 Laporan				Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani (Laporan)	1 Laporan	
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	262.500.000	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koperasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	262.500.000
			Jumlah Koperasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)	1 Unit				Jumlah Koperasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)	1 Unit	
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	236.460.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	236.460.000
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.496.308.950					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	1.460.138.650	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	1.460.138.650
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	158.990.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	158.990.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13 Orang	158.990.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13 Orang	158.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	294.022.117	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	294.022.117
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	24.980.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	24.980.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	61.701.617	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	61.701.617
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	7.000.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	7.000.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	3.840.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	192.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	192.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	334.506.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	334.506.200
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	334.506.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	334.506.200
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	435.339.733	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	435.339.733
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.400.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	86.977.605	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	86.977.605

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	188.750.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	188.750.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	144.760.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	144.760.600
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	35.910.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	90.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	18.850.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	18.850.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	1.036.170.300	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	1.036.170.300
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	1.036.170.300	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	1.036.170.300
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	461.297.250	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	461.297.250
			Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150 Sertifikat				Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150 Sertifikat	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	574.873.050	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	574.873.050
			Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan				Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.197.333.000					3.197.333.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	1.944.904.600	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	1.944.904.600
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.200.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	95.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	95.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	309.980.917	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	309.980.917
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	10.699.946	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	10.699.946
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	17.600.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	17.600.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	77.777.300	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	77.777.300
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	24.783.671	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	24.783.671
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.120.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.120.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	174.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	174.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	367.934.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	367.934.800
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17 Unit	367.934.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17 Unit	367.934.800
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	495.410.883	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	495.410.883

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.950.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.950.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	185.782.355	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	185.782.355
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	148.466.400	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	148.466.400
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.858.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.858.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1 Unit	35.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1 Unit	35.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	509.328.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	509.328.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10 Unit	39.020.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10 Unit	39.020.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.252.428.400	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.252.428.400
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400
			Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga				Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG				Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter				Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	
			Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis				Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.401.807.400				2.401.807.400	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	983.464.992	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	983.464.992
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.360.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.360.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7 Orang	95.360.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7 Orang	95.360.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	268.815.973	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	268.815.973
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	2.703.273	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	2.703.273
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2.475.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2.475.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	61.165.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	61.165.200
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	5.552.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	5.552.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	195.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	195.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	407.984.019	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	407.984.019
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	92.987.659	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	92.987.659
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	129.231.200	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	129.231.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	182.765.160	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	182.765.160
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	118.785.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	118.785.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	36.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	36.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	44.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	44.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	38.275.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	38.275.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85%	1.418.342.408	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85%	1.418.342.408
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	1.418.342.408	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	1.418.342.408
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	1.418.342.408	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	1.418.342.408
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	
			Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan)	1 Laporan				Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan)	1 Laporan	
TOTAL					52.000.000.000					52.000.000.000

Samarinda, 2022
KEPALA,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab V. Penutup

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra (Perubahan Renstra) Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2023. Renja 2023 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Akhirnya dengan tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023: ***“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat”*** (*The realization of sustainable plantation development for community welfare*).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852, 748660 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <admin@disbun.kaltimprov.go.id>

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.4/010/Kpts-Disbun/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan program pembangunan perkebunan, maka dipandang perlu untuk menyusun rencana kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa petugas yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas dalam pengumpulan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : 3.27.01.1.01 tanggal 3 Januari 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di **Samarinda**
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di **Samarinda**
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di **Samarinda**
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di **Samarinda**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/010/Kpts-Disbun/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

No.	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Ketua
2.	Ir. Surono, M.Si NIP. 19660119 199903 1 003	Sekretaris	Sekretaris
3.	Nanang Hayani, S.Hut., M.Env.Mgmt NIP. 19761105 199603 1 006	Kasubbag Perencanaan Program	Ketua Kelompok Kerja
4.	Ir. Asmirilda, M.P NIP. 19681019 199403 2 002	Kabid Perkebunan Berkelanjutan	Anggota Kelompok Kerja
5.	Ir. Hj. Rr Zuraida Henny Hapsari, M.P NIP. 19660629 199703 2 001	Kabid Pengembangan Komoditi	Anggota Kelompok Kerja
6.	Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si NIP. 19720223 200701 1 014	Kabid Usaha	Anggota Kelompok Kerja
7.	Hj. Siti Juriah, S.P NIP. 19640801 198601 2 002	Kabid Pengolahan dan Pemasaran	Anggota Kelompok Kerja
8.	Andi Siddik, S.P., M.Ling NIP. 19710518 200003 1 003	Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)	Anggota Kelompok Kerja
9.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)	Anggota Kelompok Kerja
10.	Mahmud Kahfi, S.P., M.P NIP. 19711009 199803 1 008	Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)	Anggota Kelompok Kerja
11.	Muhammad Reza Pahlevi, S.Hut NIP. 19790903 200701 1 007	Pengelola Program dan Laporan	Anggota Kelompok Kerja
12.	Anna Harlina, SP NIP. 19770321 200212 2 005	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota Kelompok Kerja
13.	Santy Marlina, SE NIP. 19731206 200801 2 010	Pengelola Data	Anggota Kelompok Kerja
14.	Mega Bharahmawaty NIP. 19800715 200801 2 026	Pengadministrasi Umum	Anggota Kelompok Kerja

No.	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
15.	Arni Hartanti, S.Si	Pengelola Website	Anggota Kelompok Kerja
16.	Kiki Purwanti, S.Kom	Sekpim	Anggota Kelompok Kerja
17.	Muhammad Fachrozi, ST	Pengumpul Bahan Informasi	Anggota Kelompok Kerja

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014